

Menjadikan Masyarakat Konsumen yang Cerdas

06 Ruang Utama

42 Ruang Tamu

18 Ruang Belajar

Sehatkan Negeri Bersama Jamu





Ilustrasi Cover: Moon, Rahardjo Putranto

MaPOM

Majalah Pengawasan Obat dan Makanan

Vol.6/No.2/2024

ISSN 2808-4683



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi majalah dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin dari penerbit.



Untuk izin memperbanyak MaPOM dengan jumlah tertentu, **serta saran dan masukan untuk MaPOM**, silakan menghubungi tim redaksi MaPOM lewat *scan barcode* berikut:



Tim redaksi akan memberikan **hadiah menarik** untuk **3 pemberi saran/masukan yang paling kreatif**.



Susunan Redaksi

Pengarah

Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D

Pembins

Irfan, Pol. Dr. Jayadi, S.I.K., M.H.

Pemimpin Redaksi

Noorman Efendi, SP., M.Si.

Tim Redaksi

Bra Rosmalasari, S.Si., Apt., M.K.M.
Hendriq Fauzan Kusfanto, S.Farm, Apt
Gita Indah Nundyia Sari, S.Farm., Apt
Fathani Nur Hamdi, S.Sos.
Dian Hermawati, S.Farm, Apt

Tim Sekretariat

Tri Kuswanto, S.E
Zulfikar Rasyad Listyanto, S.Ikom
Fadila Utami, S.Ak
Falsai Nur Jabbar, A.Md.
Ammadeta, S.Tikom
Farhan Al Hamidy, S.I.Kom

Tim Penulis

Alexander Arie Sanata Dharma S, S. Farm, Apt, MA
Aziz Setiawan, S.Si
Benny Robin, S.E
Desiana Nurwanti, S.Farm, Apt
Devi Oktaviani, S.I.Kom
Dewi Nurjanah, S.Farm, Apt
Dian Rianti Alisa, S.Far
dr. Rosa Irmasari Hosni Putri
Dwi Ary Restuti, S.Farm, Apt
Fadila Pasyan, S.Sos
Fadlan Khaerul Anam, S.Sos
Ida Farida, S.Si, Apt
Lia Rizki Amalia, S.Farm
Maulvi Muhammad Adib, S.Sos
Moch. Rahardj Putranto, S.Ars
Muhammad Rizky, S.E
Nelly Luthiani Rachman, S.Sos
Nur Annisa Rahmah, S.Farm, Apt
Puji Astuti Ajuningtiyas Sudarto, S.Farm., Apt
Sery Marlanty, S.Farm., Apt
Yanuar Rahman, S.Ikom
Zain Fadhlurrahman, S.TP

Alamat

Jl. Percetakan Negara Nomor 23,
Jakarta - 10560, Indonesia
Phone: (+62)21 4244691/42883309/42883462
FAX: (+62)21 4263333
SMS: (+62) 8121 9999 533

Salam Sehat

Sudahkah anda minum jamu hari ini? Jika sudah, apakah anda tahu setiap tanggal 27 Mei diperingati sebagai Hari Jamu Nasional? Ya, Indonesia menetapkan tanggal 27 Mei sebagai momen penting untuk merayakan dan mengangkat kembali warisan budaya Indonesia yang kaya akan khasiat.

Sejarah dan perkembangan tentang jamu menjadi bahasan utama dalam Majalah Pengawasan Obat dan Makanan (MaPOM) Vol.6/No.2/2024 kali ini. Dalam rubrik Ruang Utama ditulis dengan apik cerita tentang nasib jamu dari masa lalu ke masa depan.

Selain jamu, Ruang Utama mengajak pembaca untuk ikut ambil bagian dalam menjaga keamanan pangan. Berbagai isu diangkat dari permasalahan keamanan pangan, program keamanan pangan BPOM, dan peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia yang terus mengingatkan bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama.

Pada rubrik Ruang Belajar, pembaca dapat menikmati cerita tentang *beauty enthusiast*, yang terus berkembang dengan pengikut yang besar dari kalangan anak muda, dan perannya dalam mengedukasi masyarakat tentang kosmetik yang aman. Selain itu, ada juga tulisan menarik peran BPOM mendorong transformasi usaha mikro dan kecil (UMK) dalam keamanan dan kualitas obat bahan alam.

Menilik lebih dalam, pembaca disuguhkan ulasan pertemuan ke-17 Codex Committee on Contaminants in Food dalam menghadapi tantangan ekspor melalui perkuatan standar keamanan pangan. Selanjutnya ada kerja sama BPOM dan Duke-NUS CoRE Singapura dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan The 39th AOC Meeting.

Rubrik jendela juga mengungkapkan bagaimana upaya BPOM mendukung keterbukaan informasi publik melalui peningkatan kompetensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPPID) dan Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) 2024. Kedua kegiatan ini merupakan bentuk pengembangan kompetensi bagi jajaran BPOM di seluruh pelosok Indonesia.

Masuk ke rubrik Ruang Tamu, ada sosok Ketua Gabungan Pengusaha (GP) Jamu yang berbagi cerita bagaimana jamu dari masa ke masa. Humas BPOM berkesempatan melakukan wawancara dan mendapatkan *insight* tentang kinerja dan kolaborasi antara GP Jamu dengan BPOM dalam memperkuat industri jamu Indonesia.

Tak kalah menarik adalah cerita tentang program pendampingan pro-aktif BPOM dalam upaya meningkatkan kualitas layanan di bidang obat bahan alam, yang hadir dalam rubrik Dapur UMKM.

Melalui berbagai tulisan pada edisi kali ini, segenap awak redaksi MaPOM menggugah rasa pembaca untuk bersama menjaga jamu sebagai warisan dan budaya bangsa. ■

Pemimpin Redaksi MaPOM



BERANDA 03

HALOBPOM 05

RUANG UTAMA 06

Menimbang Nasib Jamu
dari Masa Lalu ke Masa Depan
Kunyit Asam dan Ramuan Tradisional Indonesia:
Siapa Mendunia
Bersama Jaga Keamanan Pangan
Bersiap Hadapi Ketidakpastian

RUANG BELAJAR 18

Kesenian Tradisional
Jembatan Edukasi Pangan Aman ke Seluruh Lapisan Masyarakat
Literasi Kosmetik Aman
untuk *Beauty Enthusiast*
Ajak Pelaku Usaha Pahami
Keamanan dan Kualitas Obat Bahan Alam

JENDELA 28

Pertemuan ke-17 *Codex Committee on Contaminants in Food*:
Hadapi Tantangan Ekspor melalui Perkuatan Standard
Keamanan Pangan
Menjaga Standar dan Mengglobal
BPOM di The 39th ASEAN Cosmetic Committee Meeting
BPOM Persiapkan Pasukan
Hadapi Anomali Informasi
Kerja Cepat Si Sapu Jagat:
Perjalanan WIKOM 2024 Perkuat Kompetensi Kehumasan BPOM
Kerja Sama BPOM dan Duke-NUS CoRE Singapura
Tingkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

BINGKAI 40

Satu Dekade Berpredikat
Wajar Tanpa Pengecualian

RUANG TAMU 42

Menggendong Industri Jamu Nusantara
Asa dan Keluh Kesah Pelaku Usaha

GALERI 46

Dokumentasi Kegiatan Strategis

DAPUR UMKM 48

BPOM Tingkatkan Kualitas Layanan di Bidang Obat Bahan Alam
Melalui Program Pendampingan Pro-Aktif (Jemput Bola)

RUANG KERJA 50

KOMPAK Pangan
Sinergi dan Solusi untuk Keamanan Pangan UMK Steril Komersial
Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tertibkan *Skincare* Etiket Biru Tak Sesuai Ketentuan
Kemandirian Fraksionasi Plasma Dalam Negeri
untuk Masa Depan

FILLER 60

Menuju Ibu Kota Nusantara
Membangun Kesiapan Infrastruktur dan SDM



8



19



30



51

Tanya HALOBPOM:
Apa saja klaim khasiat yang disetujui untuk produk jamu?

HALOBPOM Menjawab:

Jamu adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Klaim Khasiat Obat Bahan Alam, jenis klaim khasiat obat bahan alam terdiri atas :

1. Klaim pemeliharaan kesehatan secara tradisional (traditional health use);
2. Klaim tradisional untuk pengobatan (traditional treatment);
3. Klaim pengobatan terbukti secara ilmiah (scientifically established treatment).

Klaim pengobatan terbukti secara ilmiah harus dibuktikan dengan data proporsional dari studi efikasi dan dokumentasi yang relevan dengan produk yang didaftarkan. ■

Tanya HALOBPOM:
Apakah jamu gendong memerlukan izin edar dari BPOM?

HALOBPOM Menjawab:

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, jamu gendong dikecualikan dari kewajiban memiliki izin edar BPOM. ■

Tanya HALOBPOM:
Apakah untuk pendaftaran izin edar produk jamu wajib memiliki penanggung jawab apoteker?

HALOBPOM Menjawab:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, penanggung jawab teknis yang berada di sarana produksi obat tradisional bergantung pada jenis usahanya.

1. Untuk industri obat tradisional (IOT), wajib memiliki apoteker.
2. Untuk usaha kecil obat tradisional (UKOT), minimal apoteker atau tenaga teknis kefarmasian (TTK) yang

terlatih jika memproduksi cairan obat dalam (COD) dan kapsul, dan minimal tenaga teknis kefarmasian (TTK) jika selain COD dan kapsul.

3. Untuk usaha mikro obat tradisional (UMOT), minimal tenaga teknis kefarmasian (TTK) atau tenaga kesehatan tradisional jamu.

Sebagai informasi :

1. IOT adalah industri yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat bahan alam;
2. UKOT adalah usaha yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat bahan alam, kecuali bentuk sediaan tablet, effervesen, suppositoria, kapsul lunak, dan aerosol obat luar;
3. UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat bahan alam dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan. ■

Tanya HALOBPOM:
Bagaimana cara mengenali jamu yang mengandung bahan kimia obat (BKO)?

HALOBPOM Menjawab:

Kandungan bahan kimia obat (BKO) pada obat bahan alam hanya dapat diketahui melalui uji laboratorium, namun ciri-ciri obat bahan alam yang diduga mengandung BKO

dapat dikenali, antara lain :

1. Menampilkan gambar-gambar vulgar pada kemasan dan memberikan kesan tidak sopan.
2. Mencantumkan klaim berlebihan seperti menyembuhkan bermacam-macam penyakit.
3. Menawarkan efek instan/cepat.
4. Tidak mencantumkan nomor izin edar (NIE) atau mencantumkan NIE fiktif yang tidak terdaftar di BPOM. ■

Tanya HALOBPOM:
Apa saja daftar jamu yang mengandung bahan kimia obat (BKO)?

HALOBPOM Menjawab:

Informasi produk obat bahan alam yang mengandung BKO berdasarkan pengawasan dan pengujian BPOM dapat di cek melalui Aplikasi BPOM Mobile dan website <https://e-penjelasanpublikotsk.pom.go.id/> dan melalui aplikasi BPOM e-Penjelasan Publik OT&SK yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store. ■



Oleh : Fadlan Khaerul Anam
Editor : Fathian Nur Hamidi

Menimbang Nasib Jamu

dari Masa Lalu ke Masa Depan

Siapa tak kenal dengan Soekarno, Bapak Proklamator? Pasti semua orang Indonesia mengenalnya, minimal pernah mendengar namanya. Namun tak semua orang tahu bahwa jamu punya peran penting dalam hidup Soekarno. Inggit Ganarsih, istri Soekarno, terkenal keahliannya membuat bedak dan jamu. Dengan keahlian tersebut, Soekarno dan Inggit dapat membiayai kehidupannya sehari-hari. Walau jamu tak membuat cinta mereka berdua abadi, Inggit Ganarsih terus meramu jamu hingga akhir hayatnya.

Jamu bukan hanya diminati Soekarno, tapi diminati banyak orang. Pada tahun 1940, para pengusaha jamu menghadiri seminar pertama Jamu di Solo dan dibentuk Panitia Jamu Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Jawatan Kesehatan Rakyat Prof. Sato. Panitia ini bertugas untuk mengimbuu para pengusaha jamu secara sukarela mendaftarkan resep pribadi mereka untuk diperiksa dan dinilai oleh Jawatan Kesehatan Rakyat.

Namun, dari kisah panjang terbentang dari zaman kolonial hingga sang proklamator, jamu dikonsumsi hanya untuk kebutuhan perorangan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada masalah atau mudarat jika jamu diproduksi massal untuk banyak orang?

Mari kita mundur sejenak ke zaman pra kolonial. Relief candi-candi mengungkap rahasia jamu. Pada dinding

Candi Borobudur, terdapat relief pohon Kalpataru perlambang kehidupan abadi. Para wanita di masa itu terlihat sedang mencampur tanaman untuk pemulihan dan perawatan tubuh.

Khasiat tanaman herbal juga sudah dicatatkan oleh masyarakat secara turun temurun misalnya Primbon Betajemur Adammakna yang diterbitkan oleh Raden Soemodidjojo digunakan sebagai panduan bagi pengobatan di kalangan bangsawan dan non bangsawan. Pada tahun 1966, dua buku muncul yaitu Tjabe Pujang Warisan Nenek Mojang yang diterbitkan Prapantja dan Catatan Jamu tradisional yang ditulis oleh seorang istri Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Sejak orde baru, industri jamu mulai muncul. Pada tahun 1976, muncul Perseroan Terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Pada tahun 1997, Sido Muncul

membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Klepu, Kecamatan Bergas, Ungaran, Jawa Tengah dan diresmikan tahun 2000. Mulai banyaknya masyarakat yang mengonsumsi jamu dan munculnya pabrik jamu, kita bertanya bagaimana peran negara dalam mengelola komoditas ini?

Saat Negara Mulai Melirik Jamu

Sejak BPOM masih berbentuk Dirjen POM di bawah Kemenkes, pengawasan jamu modern yang beredar di Indonesia telah dilakukan. Kemudian dengan berdirinya BPOM di tahun 2001, BPOM semakin menunjukkan keseriusannya untuk memberantas obat tradisional ilegal.

Pada kurun waktu 2001--2007 temuan obat tradisional mengandung bahan kimia obat (OT BKO) menunjukkan tren ke arah pengobatan rematik



Pimpinan BPOM dan Kemkes PMK meninjau sejumlah produk jamu dalam peringatan Hari Jamu Nasional di Kantor BPOM, Jakarta (27/5/2024).

kemeja biru navy, sedangkan para tamu mengenakan ragam corak batik. Suatu forum diskusi pemangku kepentingan dalam pengembangan obat bahan alam menjadi fitofarmaka bergema

“Pengembangan OBA seharusnya relatif lebih mudah daripada obat konvensional karena didukung ketersediaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia.”
- PIt. Kepala BPOM, L. Rizka Andalusia -

dan penghilang rasa sakit antara lain penambahan bahan obat fenilbutazon, metampiron, parasetamol, dan asam mefenamat. Sedangkan pada periode 2008 s.d. pertengahan 2011 temuan OT BKO menunjukkan perubahan tren ke arah obat tradisional pelangsing dan penambah stamina dan afrodisiak (meningkatkan gairah seksual) antara lain mengandung bahan obat sibutramin, sildenafil, dan tadalafil.

Semula gelap, terbitlah terang. Istilah itu mungkin tepat untuk menggambarkan bagaimana jamu mulai mendapatkan perhatian. Pada 27 Mei 2008, pertama kalinya keberadaan jamu diproklamkan dan tanggal tersebut diresmikan sebagai Hari Kebangkitan Jamu Indonesia yang dikenal sebagai Hari Jamu Nasional. Tiap tahun, BPOM merayakan hari spesial ini dengan beragam acara yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan jamu yang aman.

Sejak 2010, pemerintah telah memiliki keseriusan untuk mengakui jamu. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/Menkes/Per/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan menyebutkan bahwa pengobatan tradisional merupakan salah satu cara yang diakui sebagai upaya untuk mengatasi kesehatan masyarakat Indonesia. Di tahun yang sama kemudian didirikan juga Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) di Tawangmangu, Jawa Tengah yang

mengumpulkan dan meneliti khasiat dari tanaman obat.

Melompat ke depan pada 2020, saat pandemi COVID-19 datang tak menurunkan semangat BPOM untuk mendorong jamu sebagai produk unggulan negeri. Walau sedang dilanda pandemi, BPOM melihat adanya peningkatan jumlah permohonan pendaftaran produk obat tradisional untuk memelihara daya tahan tubuh sebesar 131,14% pada 2020 dibandingkan dengan 2019. Tren tersebut menggambarkan antusiasme masyarakat terhadap produk jamu.

Pemerintah punya kepedulian lebih besar dari sekedar melakukan pengawasan dan membentuk kelembagaan. Pada 2023, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu. Peraturan tersebut dibuat supaya pengembangan dan pemanfaatan jamu memberikan dampak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, daya saing, dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan tetap menjaga konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari.

Menentukan Masa Depan Jamu

Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM tampak sesak pada Senin pagi itu. Sesak bukan karena upacara, tapi karena ada acara yang sangat penting digelar. Para ASN BPOM rapi menggunakan

memperingati Hari Jamu Nasional ke-16 yang jatuh pada 27 Mei 2024. BPOM menyelenggarakan Pekan Jamu Nasional bertema “Sehatkan Negeri Bersama Jamu” selama 6 hari.

Semua peserta tampak khushuk menatap layar. PIt. Kepala BPOM L. Rizka Andalusia tampak serius membuka kegiatan. Menurutny pengembangan obat bahan alam (OBA) relatif lebih mudah daripada obat konvensional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa kekayaan dan keragaman hayati Indonesia harus menjadi modal dasar kebangkitan industri obat dalam negeri, serta penguatan ketahanan kesehatan masyarakat. Kalimat tersebut menggema memotivasi para peserta untuk terus mengembangkan riset obat bahan alam.

Pemerintah menyiapkan tim khusus untuk mempercepat pengembangan OBA. Pembentukan satuan tugas (satgas) ini memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengembangan fitofarmaka.

“Optimalisasi ini dilakukan melalui penguatan peran satgas yang mengarah pada peningkatan produksi bahan baku produk fitofarmaka dalam negeri, peningkatan jumlah fitofarmaka yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri, peningkatan penggunaan fitofarmaka dalam pelayanan kesehatan, serta peningkatan fitofarmaka sebagai komoditas unggulan dalam negeri dan komoditas ekspor”, ujar PIt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator



Para peserta antusias minum jamu bersama dalam peringatan Hari Jamu Nasional di Kantor BPOM, Jakarta (27/5/2024).

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Budiono Subambang.

Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM tak hanya sesak oleh peserta, berjejer juga meja-meja dengan warna-warni kemasan produk obat tradisional. Gurat senyum tersimpul di wajah para pimpinan BPOM dan para narasumber yang mendatangi meja-meja tersebut satu per satu. Para produsen obat tradisional berlomba untuk menampilkan produk unggulan mereka. Bentuk kemasannya pun beragam, ada yang berbahan kaca, plastik, dengan tutup berwarna putih, hijau, hitam, dan cokelat.

BPOM juga menggelar serangkaian webinar hingga hari Jumat. BPOM ajak komunitas masyarakat, pengurus Pramuka, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), perguruan tinggi, serta organisasi profesi dan mahasiswa untuk ikut webinar bertema "Jamu: Dulu, Kini, dan Nanti".

Melalui webinar itu, banyak informasi baru yang sebelumnya jarang

diketahui peserta dan itu membuat mereka antusias. "Saat ini, hampir 60% masyarakat Indonesia telah menggunakan jamu yang artinya 6 dari 10 orang Indonesia mengonsumsi jamu. Selain itu, sebanyak 2.848 spesies tumbuhan telah teridentifikasi sebagai bahan obat tradisional dan 32.013 ramuan obat tradisional," ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengutip data Riset Tumbuhan Obat dan Jamu (RISTOJA) Kementerian Kesehatan RI.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan BPOM Mohamad Kashuri optimis menyampaikan pendapatnya tentang khasiat jamu. Menurutnya, bukti empiris dapat menjadi dasar klaim khasiat kategori jamu dan menjadi satu data dukung awal dalam pembuktian klaim pada kategori obat herbal terstandar dan fitofarmaka, selain bukti ilmiah berupa data praklinik dan/atau data klinik.

Jika dalam kegiatan sebelumnya

peserta antusias berkeliling, di akhir rangkaian acara peserta antusias minum jamu. Para peserta mengangkat tinggi botol berisi jamu merayakan Hari Jamu Nasional. Peringatan Hari Jamu Nasional merupakan wujud pelestarian jamu yang telah dinobatkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTE) dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). Dalam laman Decision of the Intergovernmental Committee, UNESCO menyebut bahwa jamu punya peran dalam menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Praktisi jamu meliputi ibu rumah tangga, pembuat jamu, distributor jamu, petani yang membudidayakan tanaman herbal, pakar, peneliti, dan masyarakat yang menggunakan jamu. Tiap praktisi ini saling berinteraksi satu sama lain membangun solidaritas.

BPOM bergandengan tangan dengan kementerian/lembaga untuk memajukan industri obat tradisional. Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/1163/2022 tentang Formularium Fitofarmaka yang di dalamnya mengatur evaluasi penerapan Formularium Fitofarmaka di layanan kesehatan. Selain itu, Kementerian Perindustrian melalui Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia Farmasi dan Kemasan akan mendukung kebijakan kemandirian OBA dengan menghadirkan fasilitas House of Wellness, yaitu salah satu sarana transfer teknologi dari lembaga penelitian ke industri.

Usia 16 tahun masih terbilang muda bagi perayaan Hari Jamu Nasional. Perlu diingat, kemajuan teknologi bukan hanya meningkatkan industri jamu berinovasi. Selalu ada sisi gelap teknologi yakni penyelundupan bahan baku obat yang dicampur dalam proses produksi obat tradisional ilegal. Itu semua masih menghantui kita.

Rencana Strategis BPOM periode 2020--2024 pun akan berakhir tahun ini. Dengan rencana strategis BPOM tahun 2026, BPOM optimis bisa menaikkan pamor jamu jadi melantai di kancah dunia, sekaligus mengangkat jamu di mata masyarakat sebagai produk yang aman, berkhasiat, dan bermutu. ■



Dialog Jejak Empiris Obat Bahan Alam Menuju Produk Bermutu dalam peringatan Hari Jamu Nasional di Kantor BPOM, Jakarta (27/5/2024).



TIPS JITU

ANTI **TAKEDOWN**

Untuk Penjual Kosmetik di Media Online

Pastikan

01

Memiliki Izin Edar/Notifikasi dari BPOM.

Pastikan nomor notifikasi dan produk kosmetik yang akan dijual terdaftar di cekbpom.pom.go.id dan aplikasi BPOM Mobile.

02

Mencantumkan nomor izin edar BPOM dan informasi lain sesuai label yang disetujui BPOM.

03

Promosi dan iklan harus sesuai dengan ketentuan.

Iklan kosmetik harus memenuhi ketentuan:

- Informasi harus objektif (sesuai dengan kenyataan dan tidak menyimpang dari manfaat, cara penggunaan, dan keamanan kosmetik)
- Tidak menyesatkan
- Tidak menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit

Klaim pada kosmetik harus memenuhi kriteria:

- Kepatuhan hukum
- Kebenaran
- Kejujuran
- Keadilan
- Dapat dibuktikan
- Jelas dan mudah dimengerti
- Tidak boleh seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit

04

Mencantumkan foto kemasan produk dengan jelas dan sesuai dengan kondisi asli produk.

05

Mencantumkan tanggal kedaluwarsa produk pada deskripsi produk.

06

Untuk *reseller*, pastikan produk dibeli dari distributor resmi.

Izin Edar/Notifikasi BPOM



Menjaga Kelembaban Kulit





Olleh : Aziz Setiawan
Editor : Fathan Nur Hamidi

Kunyit Asam dan Ramuan Tradisional Indonesia: Siap Mendunia

Obat bahan herbal atau yang lebih dikenal jamu terus berkembang sebagai warisan leluhur. Tak hanya di dalam negeri, beberapa komoditas jamu Indonesia telah diekspor ke sejumlah negara. Hal ini membuktikan perjalanan panjang produk herbal kita mampu beradaptasi dengan kebutuhan konsumen modern di berbagai negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, jamu—ramuan tradisional Indonesia—telah menunjukkan lonjakan signifikan dalam ekspor. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai ekspor Indonesia dari 2020 hingga Agustus 2024 mencapai angka mencengangkan, yaitu setara dengan Rp18,16 miliar. Angka ini menandakan minat global yang terus meningkat salah satunya terhadap

jenis sediaan jamu yang diekspor: cukup beragam, di mana sediaan kapsul mendominasi (120 produk), diikuti cairan obat dalam (60 produk), serbuk oral (40 produk), cairan obat luar (34 produk), tablet (30 produk), dan pil (14 produk). Hal ini menunjukkan bahwa produk jamu Indonesia telah merambah ke berbagai negara, menciptakan peluang pasar yang lebih luas.

Pencapaian ini menjadi kebanggaan

pengalamannya dalam melakukan proses pengajuan jamu ke United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). Saat itu dia menampilkan peran dan perjuangan para "Jamu Gendongers". "Akhirnya UNESCO luluh dan mengakui secara resmi jamu sebagai warisan budaya dunia, dipersembahkan oleh bangsa Indonesia," tuturnya.

Mengutip data Riset Tumbuhan



BPOM menggelar Webinar "Jamu, Kini, dan Nanti" sebagai rangkaian peringatan Hari Jamu Nasional di Kantor BPOM, Jakarta (30/05/2024).

produk-produk berbasis herbal, terutama jamu. Jamu yang diekspor berupa produk minyak telon, minyak aromaterapi, kunyit asam, parem, dan sebagainya.

Berdasarkan data BPOM tahun 2022, jumlah produk obat bahan alam kategori jamu yang mendapatkan nomor izin edar (NIE) untuk ekspor sebanyak 96 produk, tahun 2023 sebanyak 70 produk, dan tahun 2024 sebanyak 48 produk. Dari total 283 produk obat bahan alam kategori jamu tersebut, mayoritas diekspor ke Taiwan sebanyak 63 produk. Menyusul ekspor jamu ke Malaysia dan Nigeria dengan masing-masing 37 dan 34 produk.

Dari segi variasi produk, saat ini

tersendiri bagi Indonesia. Apa lagi di momen Hari Jamu Nasional yang diperingati setiap tahunnya pada 27 Mei. Tema Hari Jamu Nasional "Jamu: Dulu, Kini, dan Nanti" seolah mengingatkan kita semua bagaimana perjalanan jamu dari masa ke masa. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM Mohamad Kashuri mengajak masyarakat mengonsumsi obat bahan alam atau jamu.

Masa Depan Jamu

Jamu pernah melalui jalan panjang untuk bisa diakui sebagai warisan dunia. Presiden Komisaris Jamu Jago Jaya Suprana menceritakan

Obat dan Jamu (RISTOJA) Kementerian Kesehatan RI sebanyak 2.848 spesies tumbuhan telah teridentifikasi sebagai bahan obat tradisional dan 32.013 ramuan obat tradisional. Banyaknya keberagaman hayati Indonesia tersebut tentu menjadi potensi untuk pengembangan jamu ke depan. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan literasi masyarakat, maka pengembangan jamu ke depan dapat berdampak positif bagi kesehatan dan perekonomian masyarakat.

Jamu, yang telah digunakan sejak dahulu, bukan hanya sekadar obat namun merupakan bagian integral dari warisan budaya Indonesia. Dengan sejarah yang panjang, jamu menawarkan



manfaat kesehatan yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi masyarakat. Dalam era di mana kesehatan semakin menjadi perhatian utama, konsumen global kini lebih memilih alternatif alami daripada produk kimia. Jamu pun

kesejahteraan masyarakat lokal.

Perjalanan panjang jamu juga menjadi kisah tersendiri bagi para peneliti di industri. Director of Business Development and Scientific Affairs at Dexa Group Raymond Tjandrawinata

mengonsumsi jamu.

Setiap produk jamu memiliki cerita unik yang mengikutinya. Dari tradisi keluarga yang turun-temurun hingga inovasi modern yang menggabungkan pengetahuan dan teknologi. Narasi dan



muncul sebagai pilihan menarik mengis jargon *back to nature*, terutama di tengah tren gaya hidup sehat yang semakin mendominasi.

Namun, untuk menembus pasar internasional, produsen jamu perlu memenuhi standar kualitas dan keamanan yang tinggi. Keberhasilan ekspor jamu juga memberikan dampak positif bagi petani herbal di Indonesia. Meningkatnya permintaan pasar terhadap jamu telah mendorong minat pelatihan dan mengalirnya dukungan bagi petani herbal untuk meningkatkan kualitas tanaman. Program kemitraan antara produsen dan petani membantu memperkuat ekosistem ini, memastikan keberlanjutan serta

berpesan agar Indonesia memiliki standardisasi untuk jamu agar jamu produksi Indonesia tetap dihargai oleh bangsa lain. "Jika konsumen membeli jamu, artinya jamu sebagai tahap promotif dan preventif. Untuk sisi kuratif, pengobatan jamu harus mengikuti standar internasional dengan uji toksisitas, uji praklinik, dan uji klinik," pesannya.

Menelisik jejak jamu dari masa ke masa menghadirkan optimisme ke depan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono menyampaikan bahwa jamu merupakan ujung tombak kesehatan masyarakat. Saat ini, hampir 60% masyarakat Indonesia telah menggunakan jamu. Artinya 6 dari 10 orang Indonesia

kisah ini memberi nilai lebih pada setiap produk jamu. Cerita-cerita ini tidak hanya memperkaya pengalaman konsumen tetapi juga menambah daya tarik produk jamu di pasar internasional.

Dengan meningkatnya kesadaran akan manfaat kesehatan dari jamu, serta dukungan dari berbagai pihak, masa depan produk herbal ini tampak cerah. Jamu bukan hanya sekadar minuman tradisional namun simbol warisan budaya yang memiliki potensi besar di panggung global. Keberhasilan ekspor jamu akan terus menjadi penanda penting perjalanan Indonesia dalam memperkenalkan kekayaan tradisinya kepada dunia. ■

RESISTANSI ANTIMIKROBA

Lawan



Dengan

ABC+4T

A

Apa itu Resistansi Antimikroba



Resistansi antimikroba

adalah kondisi di mana mikroba (bakteri, virus, jamur, dan parasit) di tubuh menjadi kebal terhadap antibiotik atau antimikroba yang sebelumnya efektif membunuh atau menghambat pertumbuhannya.

B

Bahaya Resistansi Antimikroba



Penyakit akan **sulit dlobati** dan meningkatkan risiko **kematian** terutama pada anak-anak, populasi lansia, dan golongan yang mengalami penurunan fungsi imun.

C

Cara Mikroba Menjadi Resistan



Saat menggunakan antibiotik/antimikroba yang berlebihan dan/atau tidak sesuai ketentuan, mikroba dapat bermutasi dan **leblh kebal** terhadap anitibiotik/antimikroba di kemudian hari.



Tidak membeli antibiotik/antimikroba **tanpa resep dokter**



Tidak membuang antimikroba sembarangan

karena dapat memengaruhi mikroba di lingkungan sekitar



Teruskan pengobatan **sesuai dengan yang telah diresepkan** walaupun kondisi sudah membaik



Tegur dan laporkan jika mengetahui ada sarana yang menjual antimikroba/antibiotik tanpa resep



Oleh : Nelly L. Rachman
Editor : Fathan Nur Hamidi

Bersama Jaga Keamanan Pangan

Bersiap Hadapi Ketidakpastian

Siang itu, Senin (6/5/2024) di tengah ketenangan acara pemberian makanan tambahan berupa bubur di Kantor Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat suasana mendadak kisruh. Tatkala 42 orang, mulai dari balita hingga dewasa, dilarikan ke Puskesmas Pamboang akibat dugaan keracunan makanan. Gejala yang dialami mulai dari muntah-muntah hingga nyeri perut yang hebat, mengundang kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat. Media melaporkan setelah dilakukan pemeriksaan, Balai POM di Mamuju mengungkapkan bubur yang dikonsumsi ternyata mengandung bakteri *Escherichia coli*, atau E-coli.



Pt. Kepala BPOM L. Rizka Andalusia membuka secara resmi peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia (World Food Safety Day) 2024 di One Satrio, Jakarta (4/7/2024).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setiap tahun, 1 dari 10 orang di seluruh dunia mengalami penyakit akibat makanan yang terkontaminasi. Anak-anak di bawah usia 5 tahun menanggung 40% dari beban penyakit ini. Di balik angka-angka ini, terdapat cerita tentang bagaimana krisis kesehatan bisa menghantam siapa saja dan kapan saja. Kita semua berpotensi menjadi korban dari rantai pasokan makanan yang tidak aman.

Insiden di Majene ini mencuat berdekatan dengan peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia pada 7 Juni 2024. Tahun ini, tema Hari Keamanan Pangan Sedunia menekankan pentingnya keelapsagaan dalam menghadapi insiden keamanan pangan, tanpa menghiraukan tingkat keparahannya.

Insiden keamanan pangan mencakup segala situasi di mana terdapat risiko kesehatan yang sudah terkonfirmasi terkait dengan konsumsi pangan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kecelakaan dan pengendalian yang tidak memadai, hingga penipuan pangan dan peristiwa alam. Meskipun pengelolaan insiden semacam ini memerlukan kerja sama antara pembuat kebijakan, otoritas keamanan pangan, petani, dan operator bisnis pangan,

konsumen juga memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan menghadapi risiko pangan yang tidak terduga.

Permasalahan Keamanan Pangan di Indonesia

Berdasarkan laporan Balai Besar/ Balai/Loka POM tahun 2023 melalui aplikasi Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan (SPIMKer) BPOM, terdapat 122 kejadian luar biasa keracunan pangan dengan jumlah orang yang terpapar sebanyak 8.937 orang dan 4.729 orang di antaranya mengalami gejala sakit (*attack rate* sebesar 52,91%). Sedangkan korban meninggal sebanyak 18 orang (*case fatality rate* sebesar 0,38%).

Tak hanya keracunan makanan, penggunaan bahan berbahaya dalam pangan juga menjadi permasalahan pangan di Indonesia. Pada intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan 2024, BPOM masih menemukan 102 sampel (1,1% dari 9.262 sampel yang diperiksa) mengandung bahan yang dilarang, yaitu formalin (0,63%), rhodamin B (0,30%), boraks (0,28%), dan kuning metanil (0,01%). Contoh permasalahan terkait pangan lainnya adalah keamanan pangan di sekolah. Pangan yang dijual di sekitar sekolah seringkali tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan,

sehingga dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan anak-anak.

Selama 2023, terdapat 1.332 sampel pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang menjadi target pengawasan BPOM. Sampel ini diambil dari penaja pangan di sekitar sekolah, baik yang sudah pernah maupun belum pernah diintervensi oleh BPOM. Dari seluruh sampel tersebut, 226 (16,97%) sampel di antaranya tidak memenuhi syarat (TMS) dengan parameter uji penyebab TMS terbanyak yaitu *E-coli* sebanyak 26 (55,76%) sampel.

Beberapa permasalahan pangan lainnya, terdapat produsen pangan berskala kecil di Indonesia masih mengadopsi praktik produksi yang kurang higienis. Kurangnya pengetahuan tentang penanganan pangan yang baik seringkali menyebabkan kontaminasi mikroba. Kemudian sistem distribusi pangan di Indonesia yang kompleks dan belum sepenuhnya terintegrasi memudahkan masuknya produk pangan yang tidak memenuhi syarat.

Dengan populasi yang terus berkembang dan pola konsumsi yang semakin kompleks merupakan tantangan tersendiri dalam memastikan setiap makanan yang dikonsumsi aman dan berkualitas. Hal ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak, mulai dari pemerintah hingga konsumen.



Petugas BBPOM di Jakarta menunjukan sampel makanan sehat kepada pengunjung yang hadir di One Satrio, Jakarta (4/7/2024).



Program Keamanan Pangan

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengawasi peredaran obat dan makanan, BPOM memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keamanan pangan di Indonesia. Beragam program diinisiasi dan dilaksanakan sebagai upaya melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi persyaratan.

Sebagai contoh, gerakan aksi nasional PJAS yang terintegrasi dalam program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Geramas) yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan mutu pangan jajanan yang dijual di lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaan program pembinaan implementasi keamanan PJAS, BPOM memiliki kewenangan sebagai *steering committee* yang bertugas memandu, memantau, memonitor, dan mengevaluasi rangkaian pelaksanaan program di daerah. Balai Besar/Balai POM ditunjuk sebagai *organizing committee* yang berwenang secara teknis di lapangan atas seluruh persiapan, koordinasi, dan pelaksanaan program.

Menurut Laporan Tahunan BPOM, jumlah total sekolah yang telah diintervensi keamanan PJAS tahun 2017--2023 sebanyak 31.330 sekolah di 34 provinsi. Seluruh sekolah yang diintervensi tersebut merupakan sekolah yang diberikan intervensi utama berupa Bimtek Keamanan Pangan pada tahun 2017--2019, sedangkan pada tahun 2020--2023 definisi intervensi terdiri dari intervensi utama (advokasi, sosialisasi,

bimbingan teknis, monitoring & evaluasi, sertifikasi, pengawalan) serta perluasan cakupan melalui sosialisasi ke target sekolah perluasan.

Selain sekolah, BPOM juga memberikan perhatian kepada pengelolaan pasar dengan mengembangkan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), yang merupakan revitalisasi program Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya. Program ini bertujuan memastikan keamanan pangan di setiap rantai pangan, termasuk di pasar tradisional. Melalui program PPABK, diharapkan setiap komunitas pasar dapat berdaya dan mandiri dalam memastikan keamanan pangan yang dijualnya. Pada 2023, PPABK menyasar 360 pasar yang diintervensi oleh BBPOM/BPOM di 34 provinsi.

BPOM juga melibatkan masyarakat untuk melaksanakan pengawasan keamanan pangan secara mandiri. Salah satunya melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) yang bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pengawasan dan menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan serta memperkuat ekonomi desa.

Hari Keamanan Pangan Sedunia

Prepare for The Unexpected atau Siaga Hadapi Ketidakpastian. Tema Hari Keamanan Pangan Sedunia tahun ini diangkat untuk mengajak semua pihak yang terlibat dalam keamanan pangan

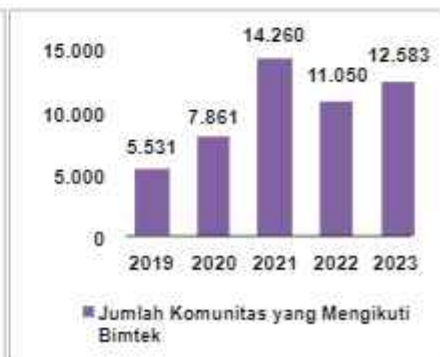
“Pangan yang aman bukan hanya menjadi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga hal penting untuk mewujudkan hidup sehat dan berkualitas, sehingga keamanan pangan ini menjadi urusan kita semua. Semua orang bertanggung jawab terhadap keamanan pangan.”

- Pjt. Kepala BPOM, L. Rizka Andalusia -

selalu siap menghadapi hal tak terduga tentang pangan. Bahaya keamanan pangan tidak mengenal batas negara, sehingga dengan semakin terhubungnya pasokan pangan global, risiko yang ditimbulkan oleh pangan yang tidak aman dapat dengan cepat berkembang dari masalah lokal menjadi masalah darurat internasional.

Tahun ini, BPOM bersama Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) menggelar peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia 2024, di One Satrio, Jakarta pada Kamis (4/7/2024). Rangkaian kegiatan yang terdiri dari *talkshow*, *food expo*, *live cooking*, dan *music performance* ini bertujuan

Capaian dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam program Desa Pangan Aman





Petugas BPOM di Jakarta menunjukkan hasil uji cepat (rapid test) sampel makanan kepada anggota Pramuka yang hadir di One Satrio, Jakarta (4/7/2024).

mengedukasi masyarakat. Bukan hanya memilih makanan yang aman, tetapi juga makanan yang lebih sehat. Lebih jauh, edukasi ini ke depannya diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Saat ini beban kesehatan masyarakat mengalami pergeseran. Jika sebelumnya penyakit menular lebih banyak terjadi, namun saat ini kasus kesehatan masyarakat yang banyak terjadi adalah penyakit tidak menular (PTM), seperti kardiovaskuler (penyakit jantung) dan diabetes melitus.

Salah satu penyebab meningkatnya PTM adalah pangan yang tidak aman. Sumbernya dari bahan tambahan pangan (BTP) yang tidak aman, bersifat karsinogenik, yang membahayakan dan tidak sesuai ketentuan, sampai dengan kandungan BTP yang tidak sehat, seperti gula, garam, dan lemak (GGL) dengan kadar yang tinggi.

Karena itu, BPOM dan GAPMMI berkolaborasi. Mengajak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berperan aktif dalam penyediaan pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau untuk membantu mewujudkan masyarakat

yang aktif dan sehat.

Tak hanya dengan GAPMMI, pada hari yang sama BPOM juga bersinergi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar seminar dan konsultasi publik dengan tema "Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Dalam Pengawasan Pre-Market Pangan Olahan". Saat ini kecerdasan buatan dimanfaatkan untuk mempermudah berbagai aktivitas atau tugas. BPOM sendiri telah melakukan kajian mengenai kesiapan pengembangan kecerdasan buatan untuk pendaftaran pangan olahan sejak 2023.

Direktur Registrasi Pangan Olahan BPOM Sintia Ramadhani menyebutkan proses registrasi pangan olahan memerlukan teknologi yang cepat, akurat, dan tepat. Pemanfaatan teknologi ini diperlukan dalam *screening* untuk memudahkan penelusuran kembali jika ditemukan penyimpangan pada mutu dan keamanan pangan.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Oahyono Tri Birowo mendukung hal ini. Oahyono Tri Birowo menyampaikan BPOM berpeluang besar mengadopsi kecerdasan buatan karena telah memiliki modal indeks SPBE 4,08 dengan predikat "Sangat Baik". Adopsi kecerdasan buatan dapat mengakselerasi transformasi digital BPOM dan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Beragam upaya, kolaborasi, dan sinergi yang dilakukan BPOM akan berjalan optimal dengan dukungan banyak pihak. Seperti semangat yang digelorakan dalam setiap peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia. Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Semua orang mulai dari produsen hingga konsumen harus memainkan peran. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan makanan yang akan dikonsumsi aman. Dengan adanya upaya bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari ancaman pangan tidak aman dan memiliki generasi yang sehat dan produktif. ■



Olleh : Maulvi Muhammad Adib
Editor : Fathani Nur Hamidi

Kesenian Tradisional: Jembatan Edukasi Pangan Aman ke Seluruh Lapisan Masyarakat

Pentas Ketoprak yang biasanya mengisahkan cerita legenda dan sejarah, kali ini tampil berbeda. Dengan balutan busana kerajaan dan alunan gamelan yang menghanyutkan, tokoh-tokoh Ketoprak di atas panggung tidak hanya membawa penonton ke dalam dunia fantasi penuh intrik, tetapi juga memberikan edukasi tentang keamanan pangan.



Adegan pementasan kesenian Ketoprak *Ksatria Bulak Perak Ondo Mas* di Auditorium Meran Putih BPOM, Jakarta (20/6/2024).

Pangan yang aman merupakan prasyarat dasar dalam pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat. Karena itu keamanan pangan sepanjang rantai pasok (*from farm to table*) mutlak menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini yang kemudian perlu digaungkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Beragam pendekatan edukasi terus dilakukan baik melalui media digital

maupun cara-cara konvensional. Salah satunya yang dilakukan BPOM dengan Pagelaran Ketoprak bertajuk *Ksatria Bulak Perak Ondo Mas*. Edukasi melalui kesenian tradisional ini sebagai upaya menyampaikan pesan penting dengan cara yang unik, menyenangkan, dan efektif. Pendekatan ini terbilang inovatif dengan memanfaatkan seni budaya yang dekat dengan masyarakat untuk menggapai berbagai lapisan, dari anak-

anak hingga orang tua.

Ketoprak, sebuah kesenian tradisional Jawa, menjadi media baru untuk menyebarkan informasi keamanan obat dan makanan. Melalui lakon yang dikemas dengan humor dan percakapan yang santai, BPOM berhasil memikat perhatian penonton. Dengan pendekatan ini, pesan esensial bagaimana memilih pangan yang aman dapat mudah tersampaikan kepada masyarakat.



Pimpinan BPOM memerankan tokoh kerajaan pada pementasan kesenian Ketoprak *Ksatria Bulak Perak Ondo Mas* di Auditorium Mersih Putih BPOM, Jakarta (20/6/2024).

Mengapa Kesenian?

Dalam upaya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan, BPOM menyadari bahwa pendekatan umum dalam edukasi terkadang sulit menjangkau seluruh masyarakat. Padahal keamanan pangan penting dipahami dan masuk ke relung hati menjadi sebuah kesadaran kolektif yang berbuah pada perubahan perilaku masyarakat. Terlebih kasus keracunan makanan di Indonesia masih terbilang tinggi.

Data menunjukkan bahwa kasus keracunan pangan di Indonesia yang dilaporkan pada tahun 2023, lebih dari 4.700 kasus keracunan makanan. Sebanyak 96 kasus di antaranya tergolong sebagai kejadian luar biasa (KLB). Mayoritas kasus ini terjadi di tingkat rumah tangga, di mana pemahaman mengenai keamanan pangan masih minim. Dari sinilah BPOM melihat celah untuk melakukan edukasi dengan cara yang lebih kreatif, menggabungkan kesenian lokal seperti ketoprak sebagai sarana penyebaran

informasi.

"Kami menyadari masyarakat awam masih sangat minim pemahaman tentang pentingnya keamanan pangan, terutama di tingkat rumah tangga. Keracunan pangan sering terjadi karena bahan makanan yang disimpan tidak sesuai standar atau disajikan dalam waktu yang terlalu lama," ungkap Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Ema Setyawati.

Menurutnya, keracunan makanan sering kali disebabkan oleh perilaku yang tidak tepat, seperti penyimpanan yang salah dan kurangnya higienitas saat memasak. Inilah yang menjadi alasan utama BPOM mencoba metode baru untuk menjangkau masyarakat dengan lebih efektif melalui kesenian tradisional.

Keracunan Makanan di Sebuah Kerajaan

Pagelaran Ketoprak ini bukan sekadar hiburan. Dengan judul *Ksatria Bulak Perak Ondo Mas*, cerita yang diangkat mengisahkan tentang sebuah kerajaan yang dilanda wabah penyakit

akibat keracunan makanan. Cerita ini mengerminkan isu nyata yang kerap terjadi di masyarakat.

"Kasus keracunan pangan di kerajaan tersebut sengaja direkayasa oleh tokoh antagonis dengan mencampurkan bahan pangan yang terkontaminasi. Ini sama seperti masalah pangan yang sering terjadi di dunia nyata," jelas Ema.

Dengan cerita yang mengena, BPOM berharap masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga keamanan pangan. Mulai dari memilih bahan makanan yang sehat hingga menyimpannya dengan baik.

Selain pementasan yang menghibur, edukasi praktis juga diselipkan ke dalam dialog antar karakter. Salah satu tokoh dalam lakon Ketoprak ini mengingatkan penonton untuk melakukan Oek KLIK (Oek Kemasaan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli produk makanan. "Ini adalah cara sederhana tapi efektif untuk memastikan makanan yang kita beli aman dikonsumsi," tambah Ema.

Pementasan tersebut merupakan



Para pemain gamelan mengikuti pementasan kesenian Ketoprak Klatris Bulak Perak Onop Mas di Auditorium Merah Putih BPOM, Jakarta (20/6/2024).

Ketoprak dipilih karena fleksibilitasnya yang memungkinkan penggabungan pesan-pesan modern tanpa merusak esensi tradisionalnya. Tim Bharata, salah satu kelompok yang berpartisipasi dalam pementasan ini, menyebut bahwa ketoprak memiliki kemampuan unik untuk mengadaptasi isu-isu kontemporer. "Ketoprak adalah media yang sangat luwes. Ceritanya bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini, dan disajikan dengan santai, bahkan komedi," ujar perwakilan dari Tim Bharata.

bagian dari perencanaan kesenian dan permainan tradisional sebagai media edukasi oleh BPOM selama perayaan World Food Safety Day pada Juni 2024. Harapannya, kesenian tradisional seperti ini bisa menjadi jembatan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk lebih memahami pentingnya pengawasan obat dan makanan dalam kehidupan sehari-hari.

Efektivitas Kesenian di Era Modern

Ketoprak dipilih karena fleksibilitasnya yang memungkinkan penggabungan pesan-pesan modern tanpa merusak esensi tradisionalnya. Tim Bharata, salah satu kelompok yang berpartisipasi dalam pementasan ini, menyebut bahwa ketoprak memiliki kemampuan unik untuk mengadaptasi isu-isu kontemporer.

"Ketoprak adalah media yang sangat luwes. Ceritanya bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini, dan disajikan dengan santai, bahkan komedi," ujar perwakilan dari Tim Bharata.

Efektivitas penggunaan kesenian sebagai sarana edukasi bukanlah hal baru. Ema menambahkan sebelumnya pemerintah juga telah memanfaatkan berbagai bentuk kesenian lokal untuk menyampaikan pesan sosial, terutama di daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau oleh media digital.

"Wayang kulit, ludruk, dan bahkan seni tradisional seperti Dul Muluk di Palembang juga berpotensi untuk dijadikan media penyampaian pesan keamanan pangan. Semuanya tergantung target audiens," jelas Ema.

Namun, di era digital ini, tantangan

baru muncul dalam menjaga relevansi kesenian tradisional di mata generasi muda. Untuk itu, Ema menegaskan bahwa perlu ada upaya yang lebih kreatif agar seni tradisional tetap menarik bagi penonton muda.

"Kami harus membuat pertunjukan semenarik mungkin tanpa melupakan pakem-pakem tradisional. Harapannya, dengan cara ini, seni tradisional tetap hidup dan dapat menjadi media edukasi yang efektif," tambahnya.

Dengan pendekatan inovatif ini, BPOM menunjukkan bahwa seni tradisional tidak hanya mampu menjadi hiburan, tetapi juga alat yang kuat dalam menyebarkan pesan penting tentang kesehatan dan keselamatan pangan. Sebuah langkah kecil namun signifikan untuk menciptakan masyarakat yang lebih waspada dan sehat. ■

Katanya, kata dia, kata doi ...
Jangan mudah percaya katanya,
sebelum mendapat informasi obat dan makanan
dari sumber yang valid dan terpercaya.

**..bukan
kata
orang,
pastikan..**



Yuk, tonton sekarang!
di **Podcast Kata BPOM**

Revisi: / Mochamad Baharudin Patrasno
Editor: / Fathin Nur Hamid

pom.go.id [@bpom_ri](https://www.instagram.com/bpom_ri) [@bpom_ri](https://twitter.com/bpom_ri) [@bpom.official](https://www.facebook.com/bpom.official)



Literasi Kosmetik Aman untuk *Beauty Enthusiast*

Coleh : Lia Rizki Amalia
Editor : Fathan Nur Hamidi

Beauty enthusiast memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat. Komunitas ini terus berkembang dengan pengikut yang besar dari kalangan anak muda. Karena itu penting bagi BPOM berkolaborasi agar mereka dapat berbagi cerita bagaimana cara memilih kosmetik yang aman.

Aula Bhineka Tunggal Ika di Kantor BPOM kali ini terasa berbeda. Berbalut desain yang manis dan ceria, menciptakan suasana yang kasual dan menyenangkan. Satu persatu muda mudi bergaya trendi masuk memenuhi ruangan. Paras cantik nan rupawan tampak antusias untuk mengikuti rangkaian kegiatan Intensifikasi Peningkatan Literasi (INSPIRASI) Beauty Enthusiast Kosmetik Aman "BPOM Bestie's Day".

Ajang yang sangat dinanti para *beauty enthusiast* untuk meningkatkan literasi terkait kosmetik. Sebut saja *beauty influencer* terkenal Tasya Farasya, Yasmin Napper, dan Oherly Juno hadir berbagi cerita pengalaman seputar dunia kecantikan. BPOM Bestie's Day tak hanya diisi dengan talkshow INSPIRASI, tapi juga peluncuran program Beauty Enthusiast Academy yang melibatkan tim ahli di bidang kosmetik.

Sejak diluncurkan pada September 2023, program INSPIRASI BPOM berkolaborasi dengan beberapa asosiasi *beauty enthusiast* mampu memberikan dampak yang terbilang signifikan. Terlihat angka iklan kosmetik di media online yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) menurun dari sebelumnya 7,76% pada 2022 menjadi 1,02%. Pencapaian ini masih perlu dioptimalkan melalui perluasan dan penguatan program INSPIRASI.

Pertumbuhan kosmetik yang cepat tanpa diikuti dengan tingkat literasi masyarakat akan memberikan masalah lain. Karena itu penetrasi program edukasi INSPIRASI perlu terus diperluas agar dapat meningkatkan literasi masyarakat dalam menggunakan kosmetik yang aman.

Selain itu, BPOM juga menghadirkan



Penandatanganan komitmen oleh 5 perwakilan komunitas beauty enthusiast disaksikan pimpinan BPOM, Jakarta (21/6/2024).

program media komunikasi BeauTea Time sebagai wadah bagi para *beauty enthusiast* untuk melakukan diskusi dan pelaporan seputar kosmetik. Jika ingin menyampaikan informasi tren seputar kosmetik, bertanya terkait kosmetik, dan ketika menemukan pelanggaran produk kosmetik yang ilegal atau *overclaim*, dapat melapor melalui subsite <https://waskos.pom.go.id/>.

Plt. Kepala BPOM L Rizka Andalusia mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan program kolaborasi ini. Rizka menilai program ini telah memberikan kontribusi terhadap kinerja pengawasan kosmetik terutama pada media *online*. BPOM juga mengapresiasi komunitas *beauty enthusiast* di Indonesia yang terus berinovasi dalam membangun tren penggunaan kosmetik aman dan berdaya saing di era digital melalui Beauty Enthusiast Award.

Tak kalah penting para *beauty enthusiast* dibekali pengetahuan bagaimana tips menerima *endorse* kosmetik agar mendapatkan *trust* dari konsumen. Prinsipnya seorang *beauty*

enthusiast harus memberikan informasi yang benar, mengulas kosmetik dengan objektif, tidak menyesatkan, sesuai dengan regulasi namun tetap kreatif dan menarik.

Peran Beauty Enthusiast

"Kalau produknya ga berBPOM, berbahaya. Biasanya aku dengan PD nya akan kasih tau aja. Gaes ini ga aman," uap Tasya Farasya pada saat *talkshow*. Saat ini masih banyak ditemukan ulasan yang disampaikan para *beauty enthusiast* yang belum memperhatikan legalitas, keamanan, mutu, penandaan produk.

Hal ini disebabkan rendahnya literasi yang menyebabkan ketidakpahaman terhadap regulasi kosmetik. Sebagai akibatnya terjadi pelanggaran promosi kosmetik yang dapat merugikan masyarakat karena paparan informasi yang menyesatkan.

Karena itu, BPOM secara konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para *content creator* untuk menyampaikan informasi yang jujur dan sesuai dengan regulasi. Para *beauty*

enthusiast juga harus bertanggung jawab atas apa yang disampaikan, karena ulasan yang disampaikan berdampak luas pada perilaku masyarakat. Peran aktif *beauty influencer*

penting dalam mendukung pengawasan kosmetik di media daring.

BPOM Bestie's Day diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat dan memperluas Program INSPIRASI-Kosmetik Aman serta meningkatkan efektivitas pengawasan kosmetik melalui kemitraan dengan komunitas masyarakat, khususnya *beauty enthusiast*. Masyarakat diharapkan menjadi lebih bijaksana dalam memilih kosmetik dan terhindar dari kosmetik yang berpotensi merugikan kesehatan di media daring. Diharapkan semakin banyak komunitas *beauty enthusiast* yang turut berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat tentang obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.

Para *beauty enthusiast* diberikan pelatihan seputar kosmetik dalam program Beauty Enthusiast Academy. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Fiandiana Yogianti menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi kulit yang harus dijaga dari paparan kosmetik berbahaya. Sedangkan Apoteker Rahmat Hidayat Syah menyampaikan konsep farmakologi *skincare*. Ini sangat penting dipahami bagaimana zat aktif pada kosmetik bereaksi dan memberikan efek pada kulit.

Untuk meneguhkan keseriusan para *beauty enthusiast*, dilakukan penandatanganan komitmen oleh 5 orang perwakilan dari Komunitas *Skincare*, Beauty Channel, Komunitas MUA Indonesia, Indonesian Beauty Vlogger, dan Beezknees Community. Dengan komitmen ini, para *beauty enthusiast* diharapkan senantiasa memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat dan mendukung pengawasan kosmetik di media *online*. Momen ini menandai langkah signifikan dalam upaya kolaboratif serta dukungan dari komunitas *beauty enthusiast* untuk berpartisipasi aktif dalam program INSPIRASI – Kosmetik Aman.

Melalui program Beauty Enthusiast Academy ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama para *beauty enthusiast* dalam memilih maupun mempromosikan produk kosmetik yang aman dan bermutu. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari penggunaan produk kosmetik ilegal/palsu maupun yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. ■



Talkshow BPOM Bestie's Day bersama para beauty enthusiast di Kantor BPOM, Jakarta (21/6/2024).



Ditulis : Puji Astuti Ayuningtias
Editor : Fathan Nur Hamidi

Ajak Pelaku Usaha Pahami Keamanan dan Kualitas Obat Bahan Alam

Obat bahan alam (OBA) merupakan komoditas asli Indonesia. Kini perkembangannya terus mendapat perhatian pemerintah. Aspek keamanan, mutu, dan manfaatnya menjadi penentu penting agar produk ini mampu bersaing di pasar. Karena itu, BPOM terus berkolaborasi mengajak pelaku usaha memahami keamanan dan kualitas OBA.



Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Rustykwati memberikan bimbingan teknis mekanisme penarikan produk TMS dan tindakan perbaikan tindakan pencegahan kepada UMKM OBA, Yogyakarta, 6-7 Mei 2024.

Industri obat bahan alam (OBA) di Indonesia didominasi oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sekitar 70--80% dari total pelaku industri. Hingga Maret 2024, terdapat 946 sarana UMKM obat bahan alam. Sebagian besar merupakan usaha kecil obat tradisional (UKOT) dan usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang telah mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Obat

Tradisional yang Baik (OPOTB) Tahap I. Sertifikasi ini menuntut pelaku usaha UKOT dan UMOT untuk menerapkan standar sanitasi dan higienis yang ketat dalam proses produksi, serta memiliki sistem dokumentasi yang baik untuk memastikan keamanan dan kualitas produk.

Pengawasan BPOM bertujuan untuk mencegah penggunaan produk

yang tidak sesuai standar keamanan dan mutu. Meski demikian, tanggung jawab ini bersifat komprehensif, bukan hanya BPOM, tetapi juga produsen obat bahan alam, distributor, konsumen, dan lintas sektor lainnya. BPOM melakukan pengawasan sebelum (*pre market*) dan selama produk beredar (*post market*) untuk memastikan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang beredar.

Salah satu upaya pengawasan BPOM terhadap produk di peredaran melalui sistem sampling dan pengujian. Hasilnya jika ditemukan produk yang melanggar maka dilakukan penarikan. Sebagai bentuk tanggung jawab, produsen atau pemilik izin edar wajib menarik produk yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Proses penarikan produk dari peredaran akan lebih mudah dengan adanya sistem dokumentasi yang baik dari pelaku usaha terutama dalam hal pendistribusian produk.

Penarikan produk atau *recall* merupakan tindakan korektif ketika suatu produk teridentifikasi tidak memenuhi standar keamanan atau mutu yang dipersyaratkan. Dalam ranah industri OBA, proses ini tidak hanya sekadar pemenuhan terhadap regulasi, namun juga mencakup tanggung jawab moral dalam menjamin keselamatan konsumen dan mempertahankan reputasi *brand*. Kemampuan pelaku usaha melaksanakan penarikan produk secara cepat akan berdampak signifikan bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Untuk itu industri OBA termasuk UMKM perlu memiliki pemahaman komprehensif terhadap regulasi terkait penarikan produk, serta kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah produk secara cepat dan akurat. Perusahaan dituntut mampu melakukan pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta keterampilan komunikasi yang efektif dengan pihak terkait, dan memastikan tindakan yang diperlukan dapat dipahami oleh semua. Sebaliknya ketidakmampuan dalam memahami hal-hal ini akan menghambat proses penarikan, tidak terlaporkannya produk-produk bermasalah dan meningkatkan risiko kesehatan konsumen.

Corrective Action Preventive Action

Tindakan perbaikan dan pencegahan atau yang biasa dikenal *corrective action preventive action* (CAPA) perlu dilakukan pelaku usaha sebagai mekanisme monitoring dan evaluasi dalam suatu siklus produksi dan distribusi OBA. CAPA merupakan proses sistematis yang dirancang untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah, mengimplementasikan solusi efektif untuk mengatasi masalah tersebut, dan menetapkan langkah-langkah preventif

guna menghindari terulangnya masalah serupa di masa mendatang.

Dalam konteks industri OBA, kompetensi pelaku usaha dalam menyelesaikan CAPA memiliki peran signifikan dalam menjaga kualitas dan integritas produk, serta menjamin keamanan dan efektivitas produk bagi konsumen. Industri OBA perlu memiliki keahlian dalam melakukan analisis akar penyebab yang mendalam. Proses ini melibatkan investigasi komprehensif untuk mengungkap faktor penyebab permasalahan yang muncul.

Analisis ini harus dilakukan dengan pendekatan metodologi yang sistematis, misalnya dengan memanfaatkan alat analisis statistik atau teknik pemecahan masalah yang terstruktur. Kemampuan ini memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan tidak hanya bersifat sementara, melainkan mampu mengatasi akar permasalahan secara fundamental.

Kedua, setelah masalah teridentifikasi, tahap selanjutnya merancang dan mengimplementasikan tindakan korektif serta preventif yang efektif. Hal ini mencakup modifikasi dalam proses produksi, revisi prosedur pengujian, atau perbaikan dalam rantai pasokan. Selain itu, tindakan preventif perlu dirancang untuk mencegah terulangnya masalah di masa depan. Semisal pelatihan tambahan bagi staf atau adopsi teknologi mutakhir.

Ketiga, kompetensi dalam monitoring dan evaluasi tindakan CAPA juga krusial untuk memastikan efektivitas solusi yang diterapkan. Evaluasi berkelanjutan perlu dilakukan untuk menilai apakah tindakan yang diambil telah mencapai hasil yang diharapkan. Ini melibatkan pemantauan indikator kinerja dan pengumpulan umpan balik dari berbagai sumber untuk memastikan masalah tidak muncul kembali.

Pemberdayaan Pelaku Usaha

Permasalahan dalam pengawasan OBA adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan dan pemahaman UMKM terhadap proses penarikan dan pelaksanaan CAPA terhadap produk yang TMS. Tantangan nyata ini perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak, termasuk BPOM, asosiasi industri, dan pelaku usaha untuk bersama-sama meningkatkan kualitas dan keamanan

“Petugas BPOM menekankan tindakan penarikan adalah bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan dan mutu produk di peredaran. Selain itu dalam penanganan produk TMS, pelaku usaha tidak hanya harus melakukan penarikan kembali, namun juga harus mampu mencari akar permasalahan penyebab produk TMS dan melakukan tindakan CAPA agar tidak terjadi temuan berulang.”

produk OBA di Indonesia.

BPOM secara berkala melakukan evaluasi terhadap penerapan OPOTB di UMKM OBA. Laporan evaluasi penerapan OPOTB menunjukkan bahwa beberapa UMKM terindikasi harus melakukan penarikan dan CAPA pada produk-produknya. Sayangnya, hasil pemantauan BPOM menemukan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan penarikan produk masih rendah.

Faktor utama kurangnya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam proses-proses tersebut, mengingat rata-rata UMKM masih memiliki OPOTB tahap 1. Karena itu diperlukan bimbingan teknis kepada UMKM OBA dalam pelaksanaan penarikan produk TMS dan CAPA. Program Bimtek ini telah terlaksana di Jakarta dan Yogyakarta. Pesertanya mencapai 40 UMKM dalam satu kali penyelenggaraan.

Kedepan BPOM akan terus melakukan monitoring dan evaluasi, serta memperluas jangkauan program pembinaan untuk memastikan peningkatan kualitas dan keamanan produk OBA di Indonesia. Dengan demikian UMKM OBA yang sebagian besar memiliki sertifikat OPOTB Tahap I diharapkan mampu melakukan prosedur-prosedur tersebut secara sederhana. Pada akhirnya produk OBA yang dihasilkan UMKM tidak hanya terjamin keamanan dan mutunya, tapi juga tumbuh berkembang dan menjadi kebanggaan kita semua. ■



PANGAN OLAHAN KEPERLUAN GIZI KHUSUS

Apa itu PKGK?

Pangan olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik/fisiologis dan penyakit/gangguan tertentu.

Pangan Olahan untuk Diet Khusus

Pangan olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik atau fisiologis tertentu.

Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus

Pangan olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk manajemen diet bagi orang dengan penyakit/gangguan tertentu.



Jenis Produk yang Termasuk PKGK

Pangan Olahan untuk Diet Khusus (PDK)

PDK untuk kelompok bayi dan anak

- Formula bayi (bayi usia 0-6 bulan)
- Formula lanjutan (bayi usia 6--12 bulan)
- Formula pertumbuhan (anak usia 1--3 tahun)
- Makanan pendamping air susu ibu (MP ASI)
- Makanan selingan untuk anak



PDK untuk kelompok dewasa

- Minuman khusus ibu hamil dan/atau ibu menyusui
- Pangan olahragawan
- Pangan untuk kontrol berat badan

Jenis Produk yang Termasuk PKGK

Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK)

PKMK untuk kelompok bayi dan anak

- Pasien dengan kelainan metabolik (*inborn errors of metabolism*)
- Dukungan nutrisi anak berisiko gagal tumbuh, gizi kurang, atau gizi buruk
- Bayi prematur
- Pelengkap gizi air susu ibu (*human milk fortifier*)
- Pasien alergi protein susu sapi
- Diet ketogenik
- Pasien malabsorpsi
- Pasien penyakit hati kronik
- Pasien *inflammatory bowel diseases*
- Bayi intoleransi laktosa



PKMK untuk kelompok dewasa

- Penyandang diabetes
- Pasien penyakit ginjal kronik
- Pasien penyakit hati kronik
- Dukungan nutrisi bagi pasien dewasa malnutrisi
- Pasien dengan kelainan metabolik (*inborn errors of metabolism*)
- Diet ketogenik



Informasi pada Label PKGK

Perhatikan juga keterangan tambahan pada label:

Pangan Olahan untuk Diet Khusus:

"KONSULTASIKAN DENGAN TENAGA KESEHATAN"

Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus:

- 01 Harus dengan resep dokter;
- 02 Produk bukan untuk penggunaan secara parenteral; dan
- 03 Nilai osmolalitas dan/atau osmolaritas (konsentrasi zat terlarut dalam pelarut/larutan) untuk produk yang diberikan secara enteral menggunakan selang makanan (*naso gastric tube*).



.. pastikan PKGK yang dikonsumsi aman, dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan/tenaga medis..





Oleh : Destiana Nurwanti
Editor : Hendriq Fauzan Kustanto

Pertemuan ke-17 *Codex Committee on Contaminants in Food*:

Hadapi Tantangan Ekspor melalui Perkuatan Standar Keamanan Pangan

Sidang ke-17 Codex Committee on Contaminants in Food (CCCCF) digelar pada 15–19 April 2024 di Panama City, Panama. Indonesia mengirimkan delegasinya pada pertemuan internasional ini. Dengan membawa misi perkuatan keamanan pangan, berangkatlah delegasi Indonesia menuju Panama City untuk menyampaikan usulannya terkait dengan etilen oksida (EtO) dan 2-kloroetanol (2-CE). Terkait apakah itu?



Presiden Panama, Laurentino Cortizo Cohen memberikan sambutan pada Sidang CCCC ke-17, Panama City (15/4/2024).

CODEX merupakan suatu komite di bawah Oodex yang bertugas menetapkan batas maksimal ataupun pedoman cemaran pangan. Codex berperan dalam melindungi kesehatan konsumen dari pangan yang tidak aman serta menjamin terciptanya praktik perdagangan internasional yang adil. Sering kali standar Codex dijadikan acuan dalam menyusun regulasi di negara anggota dan digunakan pada forum World Trade Organization (WTO) untuk menangani masalah perdagangan internasional.

Pada sidang ke-17 CCCC, BPOM memimpin delegasi Indonesia. Dasep Wahidin dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM menjadi ketua delegasi. Anggota delegasi lainnya berasal berbagai kementerian/

lembaga, antara lain Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan BPOM.

Perjalanan lintas benua dari Jakarta ke Panama City memakan waktu yang panjang, bahkan lebih dari satu setengah hari. Ditambah lagi para delegasi tertahan selama satu hari penuh di Turki karena masalah penerbangan. Meskipun lamanya perjalanan cukup banyak menguras energi, para delegasi tetap antusias untuk menghadiri sidang.

Panasnya Panama tidak jauh berbeda dengan Jakarta karena merupakan negara yang sama-sama beriklim tropis. Pada hari di mana sidang digelar, ruangan sidang begitu riuh dengan perwakilan delegasi yang datang. Mereka berasal dari 54 negara,

1 organisasi anggota (European Union), dan 7 organisasi observer.

Panama memberikan perhatian yang sangat tinggi pada acara ini. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran Presiden Panama Laurentino Cortizo Cohen yang membuka sidang tersebut. Dalam sambutannya, Presiden Panama menyampaikan bahwa Panama yang dikenal karena Terusan Panama-nya merupakan jalur strategis perdagangan dunia dan tempat yang ideal untuk menggelar diskusi ini. Presiden Laurentino Cortizo Cohen juga menambahkan bahwa keamanan pangan merupakan hal yang penting untuk menjamin perlindungan kesehatan masyarakat.

Sidang selanjutnya dipimpin oleh Sally Hoffer dari Belanda yang

merupakan *host* dari komite OCOF. Diskusi pertama dimulai dengan agenda pembahasan batas maksimal cemaran timbal (plumbum/Pb atau timah hitam) pada rempah-rempah. Tiap negara menyampaikan masukan dan usulannya masing-masing. Termasuk Indonesia yang memiliki kepentingan sebagai pengekspor rempah dunia.

Pembahasan dilanjutkan dengan agenda lainnya meliputi rencana sampling aflatoxin total dan okratoksin A pada rempah, metil merkuri pada ikan, serta pedoman terkait racun ciguatera. Indonesia juga turut mendukung agar beberapa cemaran pangan dapat dilanjutkan penyusunan pedomannya, antara lain untuk aflatoxin pada kacang tanah dan susu, kadmium, alkaloid pyrrolizidin, dan alkaloid tropan.

Indonesia dalam hal ini BPOM juga membawa misi lain yaitu mengajukan proposal agar etilen oksida (EtO) dan 2-kloroetanol (2-OE) masuk ke dalam daftar prioritas untuk dievaluasi oleh *Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives* (JECFA). Indonesia mengusulkan hal tersebut agar selanjutnya Codex dapat menetapkan standar terhadap permasalahan EtO dan 2-OE dalam pangan olahan.

Masalah EtO dan 2-OE

Permasalahan EtO dan 2-OE tidak hanya dialami oleh Indonesia. Negara penghasil mi instan lainnya seperti Vietnam, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan juga mengalami hal serupa. Sejak 2020 tercatat lebih dari 900 notifikasi tolakan ekspor yang disebabkan oleh EtO yang dapat diakses pada laman European Rapid Alert System for Food and Feed (EURASFF).

EtO merupakan senyawa yang digunakan untuk membunuh bakteri pada pangan segar seperti rempah. EtO sangat mudah menguap sehingga biasanya tidak akan terkandung lagi dalam pangan. Namun EtO bisa bereaksi dengan ion klorida dalam pangan dan membentuk 2-OE yang sering disetarakan dan dijadikan penanda EtO. Keberadaan 2-OE inilah yang sering dijadikan dasar tolakan ekspor EtO.

Senyawa EtO dan 2-OE memiliki keamanan yang jauh berbeda. Berdasarkan International Agency for Research on Cancer (IARC), EtO dapat



Suasana sidang OCOF ke-17 dan Delegasi Republik Indonesia (DELR) pada gelaran OCOF ke-17 (15/4/2024)

menyebabkan kanker pada manusia sementara 2-OE tidak menyebabkan kanker. 2-OE memiliki nilai ambang batas yang jauh lebih tinggi berupa *Chronic Reference Dose* (CRfD) sebesar 0,824 mg/kg/hari. Nilai tersebut merupakan perkiraan jumlah dosis yang tak akan menimbulkan efek merugikan apabila dikonsumsi sampai seumur hidup.

Negara Amerika Serikat mengatur EtO dalam Code of Federal Regulations (CFR) 180.161 dengan batas maksimal residu (BMR) sebesar 7 mg/kg untuk EtO dan 940 mg/kg untuk 2-OE. Di sisi lain dalam regulasi Eropa, Regulation (EC) 396/2006 dan Regulation (EC) 2015/868 menetapkan BMR pada limit kuantifikasi sekitar 0,01--0,1 mg/kg sebagai total EtO (jumlah dari kadar EtO dan 2-OE).

Indonesia menyampaikan usulan dan masukannya terkait permasalahan tersebut pada sidang OCOF. Pada akhirnya forum menyepakati EtO masuk ke dalam daftar prioritas. Tugas besar Indonesia selanjutnya yaitu

“Beragamnya regulasi terkait EtO dan 2-OE tidak hanya menciptakan kebingungan terkait keamanannya, tetapi juga menyebabkan hambatan dan praktik ketidakadilan dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, diperlukan standar internasional, dari CCCF, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk perlindungan konsumen dan perdagangan internasional yang adil. –Usulan Indonesia terkait EtO dan 2-OE

mengumpulkan data EtO dan 2-OE agar dapat dikaji oleh JECFA. Upaya Indonesia dalam mendorong standar internasional untuk EtO dan 2-OE adalah langkah penting untuk memastikan keamanan pangan dan perdagangan yang adil. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. ■



Ditieh : dr. Rosa Ismasari Hosni Puteri
Editor : Hendriq Fauzan Kusanto

Menjaga Standar dan Mengglobal: BPOM di The 39th ASEAN Cosmetic Committee Meeting

Saat ini industri kosmetik Indonesia tengah berkembang pesat. Hal ini didorong oleh tren penggunaan produk kosmetik lokal yang semakin diminati masyarakat. Setiap tahun jumlah pelaku usaha di sektor ini terus bertambah dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selain itu produk-produk kosmetik nasional juga mulai menembus pasar ekspor, membuktikan kualitas dan daya saingnya di kancah internasional.



Delegasi Republik Indonesia (DELRI), termasuk di dalamnya tim dari BPOM, pada gelaran The 39th ASEAN Cosmetic Committee (ACC) Meeting (21/5/2024)

Untuk mendukung pertumbuhan industri kosmetik dan memastikan pengawasan yang ketat terhadap produk yang beredar di Indonesia, BPOM berperan aktif dalam pembahasan regulasi internasional di bidang kosmetik. Salah satu kegiatan penting yang rutin dihadiri oleh berbagai negara ASEAN, termasuk Indonesia, adalah ASEAN Cosmetic Committee (ACC) Meeting.

ASEAN Cosmetic Committee (ACC) adalah komite yang terdiri dari perwakilan otoritas regulasi kosmetik

dari masing-masing negara anggota ASEAN. ACC bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, merevisi, dan mengawasi implementasi berbagai perjanjian yang telah disepakati. Pertemuan antar anggota ACC diadakan secara rutin dengan sistem rotasi antar negara anggota. Koordinasi yang dilakukan antar negara anggota ACC dalam pertemuan dilakukan untuk membahas permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik. BPOM mewakili Indonesia turut serta

dalam The 39th ACC Meeting yang diadakan secara daring pada 20-21 Mei 2024. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan The 39th ACC Meeting and Its Related Meetings. Sebelumnya, Delegasi Republik Indonesia (DELRI) telah mengikuti The 39th ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB) Meeting pada tanggal 13-14 Mei 2024, dan Head of Delegations (HODs) for 39th ACC Meeting pada tanggal 16-16 Mei 2024. Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara ASEAN, seperti Brunei Darussalam,



Pimpinan Delegasi Republik Indonesia (DELRI) pada pertemuan The 39th ASEAN Cosmetic Committee (ACC) Meeting Dian Putri Anggraweni membahas isu-isu terkait kosmetik (21/5/2024)

Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Terdapat 12 agenda item yang dibahas dalam pertemuan ini.

DELRI dipimpin oleh Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSKK) BPOM Dian Putri Anggraweni. Delegasi juga diikuti oleh Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Utama Kedepujian 2 BPOM, Mayagustina Andarini dan Hary Wahyu; Direktur Registrasi OTSKK Anisyah; Ketua Tim Penyusunan Standar Kosmetik Yunta Amarya; serta perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi).

Berbagai isu penting dibahas dalam pertemuan ini, di antaranya adalah regulasi terkait produk injeksi untuk estetika, pencantuman nomor notifikasi pada label produk, tanggal kedaluwarsa, penggunaan 2D barcode pada produk, metode pengujian steroid (Olobetasol Propionate), serta amandemen Annex III dan IV dalam ASEAN Cosmetic Directive (ACD). Selain itu, juga dibahas perbaikan redaksional pada daftar bahan yang diizinkan penggunaannya sebagai tabir surya (UV filter).

Agenda terpenting yang dibahas dalam The 39th ACC Meeting adalah pembahasan mengenai *Country Specific Requirement (CSR)* dalam implementasi harmonisasi ASEAN. CSR

diperlukan karena dalam perkembangan implementasi *ASEAN Cosmetic Directive (ACD)*, negara memerlukan beberapa persyaratan/ketentuan di luar ACD untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi syarat. Salah satu CSR yang dimiliki oleh Indonesia adalah kewajiban pencantuman nomor notifikasi pada penandaan kosmetik.

Indonesia, Thailand, dan Kamboja adalah negara-negara yang menerapkan sebagai salah satu alat untuk melaksanakan pengawasan *post market*. Dalam pertemuan ini ketiga negara tersebut, termasuk Indonesia, menyatakan akan mempertahankan CSR mengenai pencantuman nomor notifikasi pada label produk. Pembahasan mengenai topik tersebut juga akan dilanjutkan pada agenda *Special ACC Meeting*. Selain itu, Indonesia juga menyampaikan bahwa kewajiban semua produk kosmetik mencantumkan tanggal kedaluwarsa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Saat ini revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut sedang dalam proses.

Isu terkait CSR yang dibahas selanjutnya adalah penggunaan 2D barcode pada produk. Pada kesempatan ini, *ASEAN Cosmetic Association (ACA)* mengajukan permintaan kepada Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan 2D barcode dengan memasukkan penandaan tambahan.

Indonesia menegaskan bahwa penerapan 2D barcode telah berjalan dan implementasinya untuk saat ini telah optimal. Indonesia pun juga dapat mempertimbangkan usulan AOA di masa mendatang.

Dalam ACC Meeting juga dilaksanakan *sharing session* tentang pengaturan *dermal fillers* dan injeksi botox di masing-masing negara anggota ASEAN. Indonesia juga menginformasikan bahwa telah mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* mengenai regulasi produk injeksi estetika dan saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Pada pembahasan selanjutnya mengenai metode pengujian steroid (Olobetasol Propionate), *ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Committee (AOTLC)* menyatakan akan membandingkan 4 metode pengujian Olobetasol Propionate yang ada di Indonesia, Thailand, dan Vietnam.

Meskipun pertemuan kali ini diadakan secara daring, suasana tetap kondusif dengan semangat diskusi yang tinggi antar para delegasi. Pertemuan selanjutnya yaitu The 40th ASEAN Cosmetic Committee Meeting yang direncanakan akan diadakan pada 21–22 November 2024 di Bangkok, Thailand. BPOM sebagai bagian dari DELRI tetap berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam pengawasan kosmetik di tingkat nasional maupun internasional. ■



Oleh : Dian Firanti Alisa
Editor : Hendriq Fauzan Kusanto

BPOM Persiapkan Pasukan Hadapi Anomali Informasi

Anomali informasi menjadi hal yang kerap kita temui di era erupsi digital. Derasnya arus informasi serta kemudahan kita dalam mengaksesnya, menjadi salah satu faktor munculnya anomali ini. Banyak hal yang menandainya. Salah satunya informasi sensasional dan emosional yang lebih menarik perhatian dibandingkan informasi edukatif. Hal ini membuat masyarakat berisiko terpapar informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lantas bagaimana mengatasinya? Jawabannya adalah melalui pengelolaan keterbukaan informasi publik yang efektif dan profesional.



Pt. Kepala BPOM, L. Rizki Andalusia membuka kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Rakontek PPID) Tahun 2024, Kamis (25/4/2024).

berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM.

Prestasi tersebut merupakan buah dari upaya BPOM dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan keterbukaan informasi yang efektif. Caranya dengan selalu menjaga keakuratan dan integritas informasi yang diberikan. BPOM terus memupuk hal ini dengan mempersiapkan pasukan yang tangguh dan berkapabilitas. Koordinasi dan komitmen selalu ditegakkan, salah satunya melalui forum aktif yang dikemas melalui Rapat Koordinasi Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Rakontek PPID), Selasa (25/4/2024).

Forum ini diadakan di Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM secara *hybrid* dan dihadiri oleh setidaknya ratusan peserta. Peserta tersebut berasal dari PPID BPOM, PPID Pelaksana dari unit kerja pusat, PPID UPT, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisioner BPKN, perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), PPID Badan Publik dari beberapa perwakilan

Mengelola keterbukaan informasi publik secara efektif bukan hanya tentang memenuhi kewajiban terhadap amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga tentang menjamin akurasi dan integritas informasi yang dihadirkan kepada masyarakat. Ini sangat penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik

terhadap kredibilitas informasi yang diberikan oleh badan publik.

Sebagai badan publik, BPOM telah meraih pengakuan dalam keterbukaan informasi publik dengan predikat Badan Publik Informatif selama empat tahun berturut-turut dimulai dari 2020 hingga 2023. Terbaru pada 2023, BPOM bahkan meraih peringkat pertama kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

kementerian/lembaga, serta pelaku usaha, organisasi masyarakat dan masyarakat pengguna layanan BPOM. "Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Hingga ke Pelosok Negeri" adalah tema yang diangkat untuk membawa semangat BPOM yang selalu membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan keterbukaan informasi publik hingga pelosok.

Pada Rakontek PPID dilakukan *sharing session* bersama PPID Pelaksana yang dinilai memiliki aspek kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat yang baik sehingga dapat ditiru dan dimodifikasi oleh PPID Pelaksana lain. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Lampung berbagi mengenai inovasi unggulan dalam keterbukaan informasi publik bernama PIOM PINTAS (Pengawasan dan Pelayanan Informasi Obat dan Makanan di Pintu Masuk Sumatra). Program ini meliputi berbagai inisiatif seperti kerja sama lintas sektor, pemasangan informasi di berbagai tempat, edukasi secara langsung, pemutaran video edukasi, pengawasan

makanan, dan layanan informasi.

Pada forum ini, kapasitas PPID Pelaksana juga ditingkatkan dengan diadakannya narasumber dari Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ketua Bidang Kelembagaan Komisioner Komisi Informasi Pusat Fb. Fx. Handoko Agung Saputro menyampaikan materi mengenai kolaborasi dalam menjawab tantangan keterbukaan informasi publik di era digital. "PPID diharapkan jangan hanya bekerja dengan aspek prosedural atau normatif tetapi harus lebih inovatif dan terus mencari terobosan untuk menghadapi tantangan di era transformasi digital," ujar Handoko.

"Arah kebijakan layanan informasi publik seharusnya bersifat *user oriented/consumer oriented* dengan dukungan dari *people, process, dan technology*," tutur Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama. "Di era digital, tidak hanya teknologi yang diperkuat, sikap kolaborasi juga harus kita tanamkan, sehingga ego sektoral akan hilang dan masyarakat mendapatkan informasi dengan baik di era keterbukaan

informasi publik ini," tambahnya.

Untuk menginternalisasi semangat dalam memberikan layanan pengelolaan informasi publik yang terbaik, Pti. Kepala BPOM Rizka Andalusia memimpin pengucapan komitmen bersama. "BPOM siap berkolaborasi dengan lintas sektor untuk wujudkan keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan obat dan makanan hingga ke pelosok negeri". Dengan antusias dan penuh semangat, seluruh jajaran PPID BPOM dan PPID Pelaksana menjawab "BPOM Siap!".

Dengan pekikan serentak tersebut diharapkan Rakontek dapat meningkatkan semangat inovasi dan kolaborasi dengan lintas sektor demi meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas bagi masyarakat di era keterbukaan informasi publik. Rakontek ini adalah wujud dari BPOM yang sigap dalam menyiapkan pasukan untuk menghadapi anomali informasi yang terjadi. Pasukan BPOM ini nantinya akan meningkatkan efektivitas dalam menangani informasi yang tidak akurat atau menyesatkan terutama dalam konteks disrupsi digital. Salam Transparansi! ■

PIOM PINTAS

(Pengawasan dan Pelayanan Informasi Obat dan Makanan di Pintu Masuk Sumatra)

01

KERJA SAMA LINTAS SEKTOR

Kolaborasi dengan pemerintah daerah, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (ASDP), Bea Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Angkasa Pura dalam pengawasan dan pelayanan serta pemberian informasi kepada masyarakat.

02

PEMASANGAN INFORMASI

Spanduk/banner informasi di tempat strategis seperti pelabuhan, dan pemasangan banner serta brosur/leaflet di ruang tunggu pelabuhan.

03

EDUKASI LANGSUNG

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke penumpang kapal.

04

PEMUTARAN VIDEO

Informasi dan edukasi di kapal executive Belauheni.

05

PENGAWASAN MAKANAN

Sampling dan pengawasan makanan di sekitar pelabuhan.

06

LAYANAN INFORMASI

Isi layanan informasi, pengaduan, dan sertifikasi.





Oleh: **Devi Oktaviani**
Editor: **Hendriq Fauzan Kustanto**

Kerja Cepat Si Sapu Jagat: Perjalanan WIKOM 2024 Perkuat Kompetensi Kehumasan BPOM

Berangkat dari segala keterbatasan namun tetap harus menghasilkan kinerja yang optimal, Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) 2024 hadir membekali insan humas BPOM di Indonesia dengan kemampuan komunikasi yang efektif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Hadir di 3 wilayah, WIKOM 2024 memastikan pegawai BPOM, dari Sabang hingga Merauke, memiliki kompetensi yang setara dalam menjalankan peran strategis di bidang kehumasan.

Setiap tahun, dunia kehumasan menghadapi tantangan yang kerap berbeda seiring dengan kemajuan teknologi, pergeseran tren komunikasi, dan peningkatan harapan publik. Di era digital yang serba cepat ini, seorang humas pemerintah dihadapkan untuk menjadi sosok yang serba bisa. Sosok yang mampu beradaptasi dengan perubahan, siap menghadapi krisis, menjaga reputasi institusi, serta memastikan pesan yang disampaikan relevan dan tepat waktu.

Begitu pun peran kehumasan di BPOM. Tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengawasan obat dan makanan terus meningkat. Sebagai lembaga yang berperan langsung dalam melindungi obat dan makanan di Indonesia, BPOM bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses oleh publik. Namun penyediaan informasi saja tidak cukup. Cepat dan responsif menjadi komponen krusial untuk menunjukkan bahwa BPOM peka dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Lantas dalam menjalankan peran ini, humas BPOM harus menjadi sosok serba bisa, seperti "sapu jagat" yang siap menangani berbagai tugas dengan cepat dan tepat. Menjadi pribadi "sapu jagat" tentu harus dibekali kompetensi dan keterampilan, seperti mengasah pengalaman dengan ilmu yang tepat. *Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM)* yang diadakan

setiap tahun menjadi wadah yang ideal untuk memperdalam pengalaman dan mengubahnya menjadi keterampilan berharga.

WIKOM 2024: Mengoptimalkan Potensi di Tengah Keterbatasan



Keseruan WIKOM 2024 di 3 Wilayah Indonesia dari Mei-Agustus 2024.

"Jangan jadikan keterbatasan menjadi penghalang kita untuk berkinerja

dan berkarya. Sebaliknya, jadikan keterbatasan ini menjadi motivasi untuk mengoptimalkan potensi yang kita miliki," ujar Sekretaris Utama BPOM Rita Mahyona pada pembukaan WIKOM 2024 di Depok, (29/5/2024).

Kata penyemangat tersebut menjadi pesan utama di WIKOM 2024. Bertema: "Kerja Cepat untuk si Sapu Jagat", WIKOM 2024 berorientasi untuk mengoptimalkan potensi para Insan Humas BPOM, agar memberikan yang terbaik di bidang kehumasan meski dihadapkan pada keterbatasan waktu dan sumber daya.

Untuk memastikan kompetensi dan keterampilan ini merata secara optimal, WIKOM 2024 dilaksanakan di tiga wilayah, yaitu wilayah 1 (Sumatra, Jawa), wilayah 2 (Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara), dan wilayah 3 (Sulawesi, Maluku, Papua). Ketiga wilayah ini diikuti oleh staf Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) atau humas dari seluruh unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM.

Penyelenggaraan WIKOM 2024 di Wilayah 1 diikuti oleh 40 peserta dan dilakukan di Depok pada 28-31 Mei 2024. Pada WIKOM 2024 di



Direktur Utama Narasumber Ivan Rizalis Larin berbagi ilmu mengenai Teknik Penulisan Berita Aktual dalam Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) 2024.

wilayah 2 diikuti oleh 38 peserta yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 24-26 Juni 2024. Dan terakhir, WIKOM 2024 di wilayah 3 diikuti oleh 38 peserta dan berlangsung di Ambon pada 26-30 Agustus 2024.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, WIKOM 2024 tidak hanya menyajikan materi dan narasumber, tetapi juga melibatkan peserta secara aktif dengan hadirnya praktik lapangan berdasarkan kebutuhan kerja. Materi pendalaman

yang dihadirkan bertujuan untuk meningkatkan skill kehumasan yang dibutuhkan sehari-hari oleh para peserta meliputi alur kerja kehumasan, teknik penulisan berita, teknik membuat konten video, dan teknik fotografi jurnalistik. Setiap sesi materi dan praktik akan mendapatkan umpan balik konstruktif dan narasumber yang kredibel. Dengan pendekatan yang interaktif dan relevan, WIKOM 2024 tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membekali para

pejuang humas dengan keterampilan praktis yang diperlukan di lapangan.

Para peserta mengungkapkan bahwa kualitas materi yang disampaikan dalam WIKOM 2024 ini sangat baik. Selain itu materi disajikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, sehingga memudahkan pekerjaan rutin mereka di tempat asal.

Peserta menyarankan agar kegiatan WIKOM diadakan rutin setiap tahunnya dengan materi lanjutan bagi mereka yang telah mengikuti *workshop* sebelumnya. WIKOM 2024 dianggap sebagai contoh yang baik untuk pelaksanaan *workshop* lainnya, karena peserta tidak hanya menerima materi teoritis, tetapi juga melakukan praktik langsung yang relevan dengan proses pekerjaan yang mereka jalani. Penekanan pada *reviu* tugas yang dikerjakan juga memberikan nilai tambah, menjadikan pengalaman belajar ini semakin berharga.

Sekretaris Utama BPOM berharap WIKOM 2024 akan memberikan manfaat nyata bagi jajaran BPOM khususnya para pejuang humas, untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas namun tetap menghasilkan kinerja yang optimal. "WIKOM 2024 diharapkan membuka wawasan dan meningkatkan keterampilan peserta dalam menyiapkan, memproduksi, dan menyampaikan informasi dengan cepat dan tepat kepada masyarakat," ungkapnya.

Dalam menghadapi keterbatasan, WIKOM 2024 telah membuktikan bahwa semangat untuk berkarya dan berinovasi tidak pernah padam. Dengan semangat dan pengetahuan yang diperoleh, para pejuang humas BPOM kini siap menghadapi tantangan baru. Pesan dari Sekretaris Utama BPOM, Rita Mahyona, mengingatkan kita bahwa setiap langkah kecil menuju perbaikan bisa membawa perubahan besar.

WIKOM 2024 memberikan pelajaran agar kita dapat berinovasi membangun masa depan yang lebih baik di bidang kehumasan. Bersama mengubah tantangan menjadi peluang yang berharga. Membangun komunikasi yang efektif untuk mencegah misinformasi, yang juga bertujuan merangkul masyarakat agar ikut ambil bagian dan turut terlibat di dalamnya. ■



Narasumber Rizki Kurnia menyampaikan paparan mengenai teknik pembuatan konten media sosial dalam acara WIKOM 2024.



Peserta WIKOM 2024 berdiskusi dengan narasumber fotografi, Bawihana.



Oleh : Fadila Pasyah
Editor : Hendriq Fauzan Kusumanto

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama bagi setiap negara. Untuk melindungi kesehatan masyarakat, diperlukan sistem pengawasan yang kuat, efisien, dan berstandar internasional. BPOM, sebagai otoritas pengawasan obat dan makanan di Indonesia, menyadari pentingnya regulasi yang kokoh untuk memastikan keamanan, khasiat, dan mutu produk obat yang beredar.

Kerja Sama BPOM dan
Duke-NUS CoRE Singapura

Tingkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia



DukeNUS
Medical School

Menjawab tantangan ini, BPOM tidak hanya bergerak di tingkat nasional tetapi juga aktif menjalin kerja sama internasional untuk memperkuat kapasitas regulatori. Salah satu langkah strateginya adalah kemitraan dengan Centre of Regulatory Excellence (CoRE) di National University of Singapore (NUS) yang bekerja sama dengan Duke University, Amerika Serikat. CoRE adalah pusat pengembangan kapasitas regulatori untuk produk kesehatan dan sistem regulatori di wilayah Asia Pasifik, bertujuan meningkatkan inovasi kebijakan dan jejaring regulatori.

Kerja sama antara BPOM dan Duke-NUS CoRE dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada April 2024 tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Farmasi. Bentuk kerja samanya mencakup pertukaran informasi, konsultasi teknis, dan peningkatan kapasitas SDM melalui kursus, pelatihan, lokakarya, seminar, dan



program pascasarjana. MoU ini bukan sekadar dokumen formal, tetapi juga peta jalan menuju peningkatan kapasitas SDM di bidang farmasi.

Melalui kemitraan ini, BPOM berupaya membawa Indonesia ke tingkat lebih tinggi dalam regulasi obat, dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan untuk menghadapi tantangan global. MoU yang diumumkan pada The 7th Indonesia-Singapore Leaders' Retreat di Bogor, menegakan pentingnya kolaborasi lintas negara untuk memperkuat pengawasan dan mempromosikan inovasi kebijakan di sektor farmasi.

Implementasi MoU: Menapaki Jalan Menuju WHO Listed Authority

Implementasi MoU ini dilakukan melalui berbagai program peningkatan kapasitas pegawai BPOM. Fokus utama saat ini adalah mempersiapkan BPOM untuk meraih status WHO Listed Authority (WLA) dan memberikan Indonesia posisi strategis dalam kesehatan global. BPOM telah terdaftar sebagai transisional WLA dengan *maturity level 3* untuk vaksin sejak 2022. Dengan status WLA, Indonesia berpotensi menjadi regulator terdepan dalam sistem pengawasan obat di ASEAN.

Program peningkatan kapasitas yang direncanakan bersama CoRE, dengan dukungan Asian Development Bank (ADB), mencakup topik seperti *health products regulation, market authorization, dan good manufacturing practice (GMP)* untuk produk terapi sel, serta farmakovigilans dan *market surveillance*. Semua ini dirancang untuk memastikan BPOM terus berkembang dan siap menghadapi tantangan pengawasan di masa depan.

Kerja sama ini diharapkan membawa dampak jangka panjang. Dengan peningkatan kapasitas melalui program ini, BPOM akan lebih siap menghadapi tantangan global dan regional. Pencapaian status WLA akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan sistem pengawasan obat yang tangguh dan terpercaya. Manfaat dari status WLA tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, mempermudah ekspor dengan pengawasan regulatori



Partisipasi BPOM pada pelatihan "Fundamentals of Health Products Regulation" yang diadakan di Singapura pada 9-13 September 2024.

yang terpercaya.

Pelatihan di Singapura: Kesempatan Emas untuk Peningkatan Kapasitas

Salah satu program unggulan adalah pelatihan "Fundamentals of Health Products Regulation" yang diadakan di Singapura pada 9-13 September 2024. Sebanyak 9 pegawai BPOM mengikuti pelatihan ini sebagai bagian dari *Graduate Certificate in Pharmaceutical Regulation* oleh CoRE. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoretis, tetapi juga melibatkan peserta dalam diskusi dan *workshop* yang memperkuat keterampilan praktis mereka.

Persiapan pelatihan melibatkan pembelajaran *online* yang komprehensif untuk memastikan setiap peserta siap sebelum sesi intensif di kampus Duke-

NUS. Ini adalah kesempatan berharga untuk memperdalam pemahaman tentang regulasi produk kesehatan dan menjalin jejaring profesional dengan para ahli dari seluruh Asia-Pasifik. Kesempatan untuk mengikuti pengembangan kapasitas pegawai BPOM ini merupakan peluang emas yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bagi pegawai BPOM lainnya, ini adalah momentum untuk terus meningkatkan kapasitas dan mengambil inisiatif dalam mencari peluang serupa di masa depan.

BPOM akan terus berperan sebagai motor penggerak dalam membangun regulasi obat yang kuat di ASEAN dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan peluang ekspor. Kerja sama di bidang SDM antara BPOM dan Duke-NUS CoRE ini membantu wujudkan BPOM menjadi otoritas regulator yang diakui di mata dunia. ■

3

TIPS MENGUNAKAN OBAT OTC

Apa itu Obat OTC?

Obat OTC (*over the counter*) atau dikenal dengan obat bebas, yaitu obat yang dapat digunakan tanpa resep dokter dalam rangka swamedikasi (pengobatan sendiri).

Di Indonesia, terdapat 2 jenis obat OTC yaitu **obat bebas** dan **obat bebas terbatas**.



Lingkar hijau
logo obat bebas



Lingkar biru
logo obat bebas
terbatas



1

Tepat Beli

- Teliti saat membeli, pastikan:



Kemasan dalam kondisi
baik/tidak rusak (masih tersegel)



Mencantumkan nomor
izin edar BPOM dan
tanggal kedaluwarsa

2

Tepat Pakai dan Guna

- Gunakan obat dengan tepat, sesuai:



Indikasi/khasiat penggunaan obat



Jumlah/dosis untuk setiap kali pemakaian

Penggunaan obat yang lebih banyak dari dosis tidak menyembuhkan gejala dengan lebih cepat.



Frekuensi penggunaan dalam sehari

Frekuensi 3x1, artinya obat diminum 3 kali dalam sehari dalam rentang waktu yang sama.



Waktu pemakaian

Jika lupa minum obat, segera minum bila jeda dengan jadwal konsumsi obat selanjutnya tidak terlalu dekat, namun jika sudah terlalu dekat, dapat diminum pada jadwal berikutnya.



Jangka waktu pemakaian

Penggunaan obat sebaiknya tidak lebih dari 3 hari atau sesuai petunjuk pemakaian pada kemasan.



3

Tepat Simpan



Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak



Tidak mengubah/memindahkan dari wadah asli obat



Tidak mencampur beberapa obat dalam satu wadah



Jauhkan dari panas dan sinar matahari langsung



Letakkan obat pada tempat yang kering, sejuk, dan tidak lembab



Segera buang obat yang sudah kedaluwarsa dengan merusakemasannya



Tidak membekukan obat cair atau suppositoria



Penting untuk Diingat..!



Semua obat memiliki manfaat dan kemungkinan terjadinya efek samping.



Gunakan obat dengan tepat sesuai informasi pada brosur/kemasan.



Setiap orang memiliki respon yang berbeda terhadap suatu obat, sehingga perlu waspada terhadap kemungkinan terjadinya efek samping.



Segera hubungi dokter jika keluhan masih berlanjut dan laporkan kejadian tidak diinginkan yang diduga sebagai efek samping obat.



Laporkan kejadian tidak diinginkan yang diduga sebagai efek samping obat kepada tenaga kesehatan/medis terdekat

Tenaga kesehatan/medis yang menerima laporan tersebut akan melaporkan kembali ke Pusat Farmakovigilans/MESO Nasional.

#SatuLaporanDapatMembawaPerubahan



Olleh : Alexander Arie Sanata Dharma
Editor : Dian Hermawati

Satu Dekade Berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian

"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi adalah kewajiban bagi semuanya." Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut dilontarkan pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (PHP LKPP) tahun 2023, Senin (8/7/2024). Acara tersebut bersamaan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Opini WTP tersebut merupakan opini WTP ke-8 untuk LKPP sejak tahun 2016. Adapun pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan bagian dari mandat konstitusi BPK RI untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.



Pit, Kepala BPOM menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2023 dari BPK dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Kamis (20/6/2024).

Satu Dekade WTP

Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai institusi yang memiliki komitmen tinggi pada akuntabilitas keuangan negara memperoleh predikat WTP untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 Nomor 35.a/LHP/XV/06/2024 tanggal 21 Mei 2024. Predikat tersebut sekaligus menandai 10 tahun perolehan opini WTP untuk Laporan Keuangan BPOM.

Dengan demikian, sudah 10 tahun berturut-turut alias satu dekade Laporan Keuangan BPOM disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil ini sekaligus menjadi wujud komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan sebagai pendorong bagi kami untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran sehingga dapat memberikan manfaat nyata seluas-luasnya bagi

masyarakat," ujar Pelaksana Tugas (Pit.) Kepala BPOM L. Rizka Andalucia dalam sambutannya pada kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2023, Kamis (20/6/2024) di Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM.

Pada Tahun Anggaran 2023, BPOM baik di unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia merealisasikan belanja sebesar Rp2,1 triliun. Anggaran tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya guna pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, serta upaya meningkatkan pelayanan publik BPOM yang merupakan bagian dari komitmen perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, terpercaya, dan bebas korupsi.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Anggota VI BPK RI, sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilang mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan ketidakpatuhan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada sistem pengendalian intern. Meski keduanya tidak terlalu berdampak signifikan, namun harus tetap ditindaklanjuti.

"Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh ataupun sebagian dari rekomendasi. Hal tersebut sebagai bentuk perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi, dalam pencapaian kinerja program dan tata Kelola keuangan secara akuntabel dan transparan," urai Pius.

Terhadap kondisi tersebut, Pit. Kepala BPOM menyatakan komitmen untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sesuai dengan rencana aksi yang telah disampaikan.

Capaian satu dekade WTP ini menjadi momen penting untuk capaian serupa di masa depan. Sejalan pula dengan pesan penting dari Presiden RI Joko Widodo perihal kewajiban untuk senantiasa memperoleh predikat tersebut. ■



Oleh : Benny Robin
Editor : Dian Hermawati

Menggendong Industri Jamu Nusantara Asa dan Keluh Kesah Pelaku Usaha

Obat bahan alam asli Indonesia merupakan produk kesehatan warisan budaya bangsa yang perlu dilestarikan. Dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, obat bahan alam telah dikembangkan menjadi obat herbal terstandar (OHT) dan fitofarmaka. Sektor Industri ini meliputi jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka merupakan salah satu sektor andalan penggerak perekonomian Indonesia.



Ketua Gabungan Pengusaha Jamu (GPJamu) Jony Yuwono

Jamu telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak benda (WBTD)/Intangible Cultural Heritage of Humanity ke-13 dari Indonesia oleh The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). Ketetapan ini dikeluarkan pada 6 Desember 2023 lalu dalam sidang ke-18 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Kasane, Republik Botswana.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan sebagai landasan kebijakan membangun kemandirian sediaan farmasi nasional, termasuk Fitofarmaka. Pemerintah memberikan dukungan penuh dalam pengembangan obat dan sediaan farmasi lainnya, termasuk obat berbasis bahan alam.

Tingginya perhatian pemerintah terhadap pengembangan obat bahan alam (OBA) dibuktikan dengan penguatan payung hukum terkait pengembangan OBA melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sesuai dengan pengaturan dalam undang-

undang tersebut, BPOM bersinergi dengan lintas sektor untuk melakukan pengawasan, pendampingan penelitian, serta bimbingan teknis dalam rangka mendukung pengembangan OBA.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu juga mendorong para pembuat kebijakan untuk bersinergi mengembangkan dan memanfaatkan produk jamu untuk lebih bisa bersaing di kancan internasional. Tidak hanya bicara dampak ekonomi, namun juga jamu sebagai warisan budaya yang wajib dilestarikan.

Tanggung jawab ini tidak semata menjadi tugas BPOM, namun proses hulu ke hilir dalam kenyataannya memerlukan uluran tangan dari setiap elemen bangsa khususnya lintas sektor terkait. Menggali jejak empiris, menstimulus regulasi, dan memperbaiki ekosistem jamu menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bersama termasuk dengan pelaku usaha jamu itu sendiri.

Kali ini, Ketua Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu) Jony Yuwono berbagi cerita tentang harapannya terkait industri jamu dalam negeri dan tantangan yang dihadapi para pelaku usaha saat ini. Tim Majalah POM berkesempatan menemuinya di Café Jamu miliknya di kawasan Kota tua, Jakarta Barat, berikut rangkuman wawancaranya.

Bisa dijelaskan GP jamu saat ini membina berapa industri, bisa diceritakan pak?

Anggota kami mulai dari industri sampai UMKM produksi seperti usaha kecil obat tradisional (UKOT) dan Usaha mikro obat tradisional (UMOT), termasuk usaha jamu gendong (UJG) dan usaha jamu racikan (UJR).

GP Jamu juga memiliki anggota luar biasa, yaitu para penyalur/distributor jamu dan obat tradisional, termasuk toko obat dan eksportir, importir, serta pemasok bahan baku jamu dan obat tradisional. Selain itu, termasuk pula koperasi yang bergerak dalam pembuatan dan penjualan jamu dan obat tradisional, serta lembaga yang dianggap telah berjasa dalam pembuatan dan penjualan jamu dan obat tradisional.

Yang pasti, GP Jamu menaungi industri jamu dari yang besar-besar, seperti Mustika Ratu, Martha Tilaar, Sido

Muncul, atau Sinda Budhi, sampai [industri] yang kecil-kecil juga. Jadi, kita merangkul UMKM sampai jamu gendong juga, seperti Jamu Gendong Lestari dan jamu gendong lainnya.

Banyak pihak mungkin mengira selama ini GP Jamu anggotanya hanya dari industri dan usaha produksi yang izinnya ke BPOM saja. GP Jamu hadir untuk memayungi semua praktisi dan pejuang jamu di Indonesia.

Sekarang kita bicara industri jamu nasional. Gaya hidup berubah, tidak hanya di dalam negeri, namun juga masyarakat internasional. Saat ini, tantangan apa yang dihadapi industri jamu kita, Pak? Atau ada penyesuaian dengan adanya perubahan pola hidup masyarakat?

Ini ada pengaruh pandemi COVID-19 yang lalu. Masyarakat, tidak hanya di Indonesia, namun tren di dunia sudah melirik kembali ke hal-hal tradisional. Karena pandemi mengingatkan bahwa ujung-ujungnya obat-obat modern pun perlu waktu untuk adaptasi terhadap penyakit-penyakit yang datang (baru).

Sedangkan saat COVID-19 lalu, kunci pertahanan utama adalah daya tahan tubuh masing-masing orang. Daya tahan tersebut bukan sesuatu yang didapat secara instan, namun dibangun melalui pola makan yang baik, olahraga rutin, gaya hidup sehat, termasuk mengonsumsi jamu secara rutin. Atas dasar itu, tujuan untuk menjaga daya tahan tubuh mulai muncul tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia.

WHO juga menyebutkan hampir 80% penduduk dunia menggunakan pengobatan tradisional dan 40% obat-obat modern mempunyai akar (sumber) dari tradisional, contoh obat malaria, kina itu kan berasal dari tradisional. Jadi apapun yang tradisional itu tidak bisa divonis bahwa itu tidak efektif.

Kuncinya, hanya belum diriset saja. Contoh kunyit asam, kita sudah meminumnya sejak leluhur nenek moyang kita. Baru-baru ini diteliti kunyit merupakan *super food* yang

sangat baik menjaga peredaran darah dan otak dengan adanya kurkumin yang terkandung di dalam kunyit.

WHO dan UNESCO pun sudah mengakui budaya sehat jamu sebagai warisan budaya tak benda pada 6 Desember 2023 lalu, dengan begitu potensi pencarian terhadap jamu seluruh dunia sedang meonarnya dan kita perlu melihat kembali dan menelusur lebih dalam apa yang kita punya (jamu).

Tantangannya, masyarakat belum akrab terhadap penggunaan jamu. Maksudnya, jika disebutkan kata "jamu", yang terbayang dalam benak masyarakat adalah rasanya yang pahit, aroma yang tidak sedap, yang mungkin disebabkan cara penyajian jamu di masa lalu. Tidak sedikit ini [masyarakat] menjadi trauma dan akhirnya terjadi *rejection* untuk mengonsumsi jamu pada generasi muda saat ini.

Selain itu, generasi milenial tersebut, yang saat ini mungkin sudah dewasa, akhirnya tidak menurunkan kebiasaan minum jamu kepada keluarganya dan memilih produk-produk yang lebih praktis/non-jamu.

Indonesia sebagai *mega biodiversity* terbesar kedua setelah Amazon, kurang lebih 30 ribu jenis tanaman ada di kita [Indonesia]. Ini adalah perpustakaan resep, obat-obat yang kemungkinan besar merupakan obat untuk penyakit masa depan. Jadi, kalau kita tidak kembangkan atau lestarikan, dengan sendirinya akan punah semua potensi alam yang ada di negara kita.

Tantangan produk jamu menembus pasar ekspor? Dengan perbedaan regulasi di tiap negara?

Menurut pengamatan saya, untuk menembus pasar ekspor, kita perlu memahami dasar [tiap] peraturan. Contohnya, BPOM juga banyak membantu untuk menahan produk-produk luar (impor) masuk ke Indonesia. [Tantangan lainnya] ketidaktahuan dan data secara ilmiah yang belum dikenal. Kajian tentang jamu juga masih secara empiris, belum sistemis.

Kita juga bercermin banyak industri kita yang tidak sesuai dalam pencantuman terkait khasiat, ini juga menjadi problem utama. Salah satunya yang banyak adalah terkait *overclaim*.

Karena istilah jamu itu sangat besar,



maka kita perlu mengategorikan jamu. Misal, kategori jamu yang mengarah ke pengobatan, ya, memang wajib untuk dilakukan uji klinis dan lain-lain. Namun jika produk tersebut bersifat membantu menjaga kesehatan tubuh atau produk *life style*, saya rasa tidak perlu uji klinis, namun juga tidak menulis klaim yang *over*.

Inilah yang menjadi tantangan kita, yaitu edukasi. Kita (GP Jamu) juga banyak dibantu oleh BPOM dalam melakukan edukasi terkait kategori jamu seperti fitofarmaka, obat herbal terstandar (OHT), dan obat bahan alam.

GP Jamu di periode ini kami akan mencoba memberikan perhatian yang lebih ke arah hulu dan hilir. Hulu mulai dari pengepul bahan baku. Saat ini kami juga telah bermitra dengan AIRINDO, dalam beberapa kesempatan juga bersama Kemenkes.

Ke hilirnya terkait dengan pengembangan pemasaran, *branding* serta iklan dan promosinya. Semoga bisa juga menjangkau edukasi kepada garda terdepan penjualan jamu di Indonesia seperti toko obat, toko jamu atau obat herbal, pedagang eceran serta toko *online*.

Menurut Bapak apakah perlu penyesuaian regulasi terkait produk jamu kaitannya dengan tantangan yang bapak sebutkan tadi?

Kalau dari saya, usulannya adalah melihat jamu dari dua sudut pandang. Pertama, untuk yang mau ke arah uji klinis, maksudnya fitofarmaka, silakan melakukan uji klinis. Sedangkan yang kedua, untuk produk *life style* mungkin tidak seketat fitofarmaka. Jika disamakan dari sudut pandang perusahaan, kalau ingin pasar lebih luas apalagi ekspor, maka aturan-aturan baik dari BPOM dan negara asal harus dipatuhi dan lebih rumit.

Kenapa seperti itu? Saya mengibaratkan BPOM sebagai orang tua yang tegas menyiapkan anak-anaknya [perusahaan dalam negeri] untuk bersaing di dunia luar nanti. Jadi, peraturan-peraturan riset ini sifatnya wajar, memang seharusnya. Hanya saja seperti yang saya bilang, bagi yang mengarah (produknya) dengan menggunakan klaim, khasiatnya seperti fitofarmaka, maka harus taat kepada aturan yang berlaku. Namun, bagi produk lain yang tidak ke arah [fitofarmaka], pelaku usaha juga tidak

overclaim. Jangan bikin jamu kunyit asem, tapi klaimnya seperti obat.

Kami dari GP Jamu juga memunculkan kembali dasar atau filosofi dari jamu sebagai warisan budaya yaitu "jampi usodo", doa kesehatan. Jika belakangan ini jamu sering ditemukan mengandung bahan kimia obat, artinya kita sendiri mencemari nama jamu tersebut.

Filosofi jamu gendong seperti yang dikatakan Ibu Lakami menceritakan bahwa ia selalu minum jamu yang ia buat sebelum dijual. Jika dirasa ramuannya tidak sesuai, jamu buatannya tersebut langsung dibuang karena ia garda terdepan *quality control* untuk jamu yang ia buat. Semangat ini yang ingin kami tularkan kepada anggota GP Jamu. Seperti aturan BPOM, jika pelaku usaha ingin berkompetisi di pasar yang lebih besar, mau ke level selanjutnya ya ikuti saja (aturannya).

Dan saya garis bawahi lagi, harus dibedakan aturan terhadap dua jenis jamu, baik itu yang mencantumkan klaim dan jamu *life style*. Saat ini saya melihat aturan BPOM terkait uji laboratorium dan OPOTB belum membedakan sesuai jenis jamu yang saya sebutkan tadi. Selama jamu tersebut tidak mengklaim harusnya tidak perlu terlalu ketat kaitannya dengan uji laboratorium atau OPOTB, karena pelaku usaha susah menerapkan khususnya UMKM seperti jamu gendong.

Saat ini apa rencana GP Jamu dalam melakukan edukasi terkait manfaat dan penggunaan jamu bagi pelaku usaha baru?

Kita mulai secara aktif terlibat dalam kegiatan kementerian termasuk BPOM dan secara aktif melakukan edukasi kepada anggota kami. Saat ini saya baru menjabat dan ke depan kami akan melakukan edukasi yang lebih masif untuk anggota GP Jamu.

Tidak dipungkiri, banyak pendatang baru di industri jamu hanya karena mengikuti tren kebutuhan, khususnya pada masa pandemik COVID-19 lalu, keterbukaan informasi saat ini memudahkan individu dapat terjun menjadi pelaku usaha jamu. Misal, lihat cara membuat [minuman] jahe merah di YouTube, produksi, eh, ternyata laku tanpa mengetahui regulasi yang ada.

Artinya, ketika pelaku usaha yang

akan naik level selanjutnya [izin BPOM], ya, harusnya mulai belajar regulasi. Yang tadinya mulai dari dapur, jika ingin produksi lebih banyak, harus pindah ke ruang produksi. Lalu mulai melakukan standarisasi, pastikan produk yang dibuat konsisten kualitasnya.

Jangan ketika berkembang [usahanya], ingin tetap menerapkan *short cut* [kemudahan] seperti saat kecil [usahanya]. Padahal jumlah produksinya sudah besar. Inilah kenapa kadang UMKM terlihat tidak berkembang. Karena pelaku usaha enggan melalui tahapan-tahapan regulasi yang harus dipatuhi. Kalau pelaku usaha tidak mau menghadapi ini [aturan], ya, jangan masuk ke industri jamu. Hal ini berlaku untuk semua industri, ya, tidak hanya jamu.

Kalau kita bicara regulasi suatu negara, itu merupakan tantangan paling dasar. Oke, kamu sudah mendapatkan nomor FDA-nya, percayalah bahwa yang akan dihadapi tidak hanya itu, tapi juga marketingnya, distribusinya, bahasa juga sudah beda. Jika produk akan diekspor ke luar negeri, dipertimbangkan juga logistik pengirimannya bagaimana, SDM, dan biaya lain-lain yang juga menjadi tantangan besar.

Jadi sebagai pelaku usaha, jangan berkutat dengan regulasi karena hal itu pula yang menjadi dasar nilai tambah produk. Kalau kita tidak patuh regulasi, memang akan laku? Apalagi ditambah dengan *overclaim* pada kemasan jamunya.

Tidak hanya itu, kami juga terus melakukan kampanye edukasi agar pelaku usaha hanya menjual jamu yang alami, aman, dan berizin edar, tidak mengedarkan produk jamu yang diberi tambahan bahan kimia obat (BKO). Juga tentang bagaimana memberikan informasi yang tepat, sosialisasi slogan OEK KLIK, dan sebagainya.

Terkait regulasi yang ada di BPOM, tanggapan bapak seperti apa?

Terkait perizinan, saat ini BPOM telah memiliki performa terbaiknya dengan kemudahan perizinan secara *online*. Dulu, kalau UMKM dan industri dari daerah daftar produk, datang ke Jakarta mereka membawa printer untuk jaga-jaga ada berkas salah. Berkasnya juga bertumpuk-tumpuk. Sekarang alhamdulillah *paperless*. Saat ini sudah bisa dilakukan dari daerah, dari meja kerjanya, bahkan

sudah bisa dikerjakan dari rumah.

Harapan kami ke depan agar proses registrasi bisa lebih mudah dan cepat. Karena pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi OPOTB Bertahap juga telah memiliki komitmen. Dari sisi kami [GP Jamu] juga akan coba membantu meningkatkan kemampuan pelaku usaha agar mampu melakukan sendiri registrasinya. Kami juga membantu mengedukasi kalau jalur jamu tidak hanya jamu sebagai obat bahan alam (OBA), yang merupakan sediaan farmasi, namun ada juga yang masuk dalam kategori pangan olahan yang menyehatkan.

Kami beri contoh dalam perjalanan program orang tua asuh (OTA) Sinde di Bali, ada pelaku usaha yang sebelumnya sangat ingin mendaftarkan jamunya sebagai OBA. Akhirnya setelah mendapatkan edukasi BPOM, ternyata produknya bisa dilizinkan sebagai produk pangan olahan. Saat ini, usaha tersebut mulai eksis sebagai *botanical drink*, sudah mendapatkan izin penerapan OPPOB dan izin edar produk BPOM MD.

Kami juga melihat tidak semua pelaku usaha juga patuh. Ada juga oknum-oknum pelaku yang produknya abal-abal, di bawah standar. Kami berharap bisa bekerja sama dengan BPOM karena sempat dijelaskan kalau BPOM bisa jalur hijau bagi perusahaan yang sudah patuh dan memiliki *track record* bagus, ada kemudahan dalam proses registrasi. Kami juga berharap dilibatkan dalam mengkurasi industri mana yang layak untuk mendapatkan kemudahan tersebut.

Kami merasakan saat ini beberapa peraturan-peraturan yang diluncurkan itu digeneralkan layaknya industri farmasi, misal adanya pedagang besar obat tradisional (PBOT) yang perakuannya seperti aturan untuk PBF. Tetapi kalau di farmasi ada apotek dan toko obat dengan izin. Kalau untuk obat tradisional, jamu masih dijual grosir secara umum. Jika mereka [distributor] harus mengurus izin [PBOT], itu akan mempersulit. Kenyataannya distributor produk obat tradisional ini belum sampai ke sana.

Terkait R&D produk jamu, bisa bapak jelaskan terkait produk fitofarmaka saat ini bagaimana tanggapan dari GP Jamu?

Upaya pengembangan fitofarmaka telah dilakukan dengan baik oleh BPOM

dan kementerian lainnya. Semoga akan lebih baik lagi ke depannya dari sisi penyalpan pada saat proses uji praklinis dan klinisnya.

Namun, untuk mengarah ke sana (fitofarmaka) memerlukan biaya yang tinggi karena membutuhkan uji praklinis dan uji klinis. Ini kami kembalikan kepada pelaku usaha, apakah melihat itu sebagai potensi yang baik karena tantangannya tidak hanya regulasi dan biaya tinggi, namun bagaimana produk itu bisa diterima di masyarakat dan pemerintah.

Sebagai contoh, kalau produk fitofarmaka bisa diserap dalam program

jargon OEK KLIK.

Namun jika pemerintah berkomitmen produk fitofarmaka akan masuk ke dalam program kesehatan nasional/ BPJS Kesehatan dan membantu pemasarannya, itu mungkin bisa menjadi angin segar untuk pelaku usaha. Terutama untuk hitung kebutuhan investasi atau benefit yang didapat.

Perlu diketahui, industri jamu saat ini masih dalam *negative list* investasi, artinya investor asing tidak bisa masuk dalam bentuk penanaman modal dengan tujuan positif untuk melindungi jamu sebagai warisan asli budaya



pemerintah, misal BPJS Kesehatan; itu bisa menjadi benefit tambahan. Kalau tidak, pelaku usaha akan enggan karena biaya yang tinggi dalam proses pemenuhan regulasi dan R&D-nya. Belum lagi biaya lain seperti marketing dan lain-lain.

Di sisi lain, masyarakat masih awam dengan pengkategorian produk obat tradisional, misal kita coba tanya ke orang yang di jalan, apakah tahu perbedaan jamu dan fitofarmaka, jawabannya pasti tidak tahu. Jadi secara umum masyarakat belum akrab dengan istilah tersebut belum lagi masyarakat Indonesia itu banyak yang tidak mau membaca label, itu juga yang menjadi masalah. Padahal BPOM sudah secara massif mengkampanyekan

Indonesia.

Yang terakhir, kami dari GP Jamu mendorong agar jamu tidak dipahami begitu saja sebagai sebuah produk, namun juga sebuah warisan budaya gaya hidup sehat bangsa Indonesia. Ke depan semoga bisa lebih baik dan luas lagi pemahaman jamu di tengah masyarakat kita agar jamu semakin lestari, berkembang, dan terus bermanfaat untuk generasi muda Indonesia. Tugas kita semua menjalankan amanah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu. Konsumen saat ini juga semakin kritis. Jadi, pelaku usaha juga harus meng-upgrade dirinya untuk menghasilkan produk yang berkhasiat, bermutu, dan bermanfaat. ■



GALERI

Penulis : M. Rizky
Editor : Dian Hermawati

Pekan Jamu (27-30 Mei)



Deputi 2 BPOM Mohammad Kashuri bersama PFM Ahli Utama BPOM Reri Indriani mengajak Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK Budiono Subsanjaya untuk meninjau Perayaan Pekan Jamu Nasional di Kantor BPOM (27/5/2024). **(Foto: Benny-HumasBPOM)**



Menyemarakkan momen Pekan Jamu Nasional, BPOM gelar FGD Peran Penguat Kepentingan dalam Pengembangan Obat Bahan Alam menjadi Fitofarmaka (27/5/2024) (kiri) dan webinar bertema "Jamu: Dulu, Kini, dan Nanti" (30/5/2024) (kanan). Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber baik dari internal dan eksternal BPOM serta diikuti peserta dari perwakilan kementerian/lembaga, pelaku usaha DBA, dan peneliti DBA, secara luring maupun daring. **(Foto: Benny-HumasBPOM)**

The Asia-Pacific Food Regulatory Authority Summit (APFRAS)



BPOM hadir pada forum The Asia-Pacific Food Regulatory Authority Summit (APFRAS) Ke-23 di Seoul, Korea Selatan (13/5/2024). Keikutsertaan pada forum ini berfokus pada tujuan memperkuat kerja sama keamanan pangan antara Indonesia dengan negara-negara anggota APFRAS. **(Foto: Dokumentasi HumasBPOM)**

Kesenian Ketoprak



BPOM suguhkan pertunjukan kesenian ketoprak sebagai inovasi baru dalam penyebaran informasi dan edukasi terkait obat dan makanan di tengah masyarakat (20/5/2024). Promosi kesehatan bersalut kearifan lokal diharapkan menjadi cara penyampaian pesan mengenai obat dan makanan yang efektif bagi masyarakat. **(Foto: Benny-HumasBPOM)**

CODEX



BPOM menerima kunjungan delegasi National Codex Committee (NCC) Timor Leste (26/08/2024) untuk melakukan benchmarking sistem pengawasan pangan di Indonesia. Tim NCC berkesempatan mengunjungi Laboratorium Kimia Pangan Olahan di PPPOMN bersama Kepala PPPOMN Susan Gracia Arpan.

(Foto: Rizky-HumasBPOM)

Beauty Enthusiast



BPOM menggandeng para beauty enthusiast melalui kegiatan BPOM Bestie's Day-Intensifikasi Peningkatan Literasi Beauty Enthusiast (Inspirasi) Kosmetik Aman (21/6/2024). Influencer kecantikan, seperti Tasya Farasya, dan narasumber di bidang kesehatan, seperti Apoteker Rahmato, turut hadir berbagi informasi untuk meningkatkan literasi tentang kosmetik aman. (Foto: Chandra-HumasBPOM)



Beauty Enthusiast berkesempatan menggali informasi dari BPOM mengenai kosmetik aman dan regulasi kosmetik pada kegiatan BPOM Bestie's Day di Kantor BPOM (21/6/2024). Melalui kegiatan ini, BPOM mengajak peran aktif influencer kecantikan mengoptimalkan pemahaman dan literasi masyarakat tentang cara memilih kosmetik aman dan regulasi kosmetik. (Foto: Chandra-HumasBPOM)



BPOM Tingkatkan Kualitas Layanan di Bidang Obat Bahan Alam Melalui Program Pendampingan Pro-Aktif (Jemput Bola)

Jika mendengar istilah pelayanan publik, apa yang terbesit di pikiran Kamu? Meja layanan yang tinggi? Nomor antrean yang panjang? Atau penjelasan normatif dari petugas layanan tentang seabreg persyaratan perizinan yang harus dipenuhi?



Oleh : Ida Farida
Editor : Dian Hermawati

Perkembangan teknologi di bidang informasi telah membuka wawasan kita terhadap berbagai paradigma baru, termasuk di bidang pelayanan publik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik pemerintah sangat mudah disuarakan melalui berbagai media. Hal tersebut mendorong seluruh instansi pemerintah berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik, yang semula hanya berorientasi kepada proses menjadi berorientasi kepada kepuasan masyarakat.

Jumlah Sertifikat CPOTB Bertahap



Grafik Peningkatan Sertifikat CPOTB Bertahap

BPOM sebagai instansi pengawas obat dan makanan berinovasi menciptakan konsep layanan publik pro-aktif dalam pengurusan perizinan di bidang obat dan makanan. Perizinan ini termasuk perizinan perizinan di bidang obat bahan alam (OBA) melalui program Pendampingan UMKM secara pro-aktif.

Konsep layanan publik pro-aktif dirancang untuk meningkatkan kemudahan pelaku usaha OBA dalam mengakses layanan perizinan berusaha di bidang OBA dari BPOM. Layanan dilakukan dengan mendorong sikap proaktif petugas BPOM dengan mendekat kepada pelaku usaha untuk memberikan layanan konsultasi serta pendampingan dalam pengurusan perizinan dan pemenuhan persyaratan (layanan jemput bola).

Dalam memberikan layanan ini, BPOM membuka kanal layanan perizinan melalui berbagai media yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha dalam mengajukan permohonan. Permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh petugas layanan atau fasilitator, baik di pusat maupun di daerah. Petugas akan menghubungi pemohon dan memberikan layanan konsultasi secara langsung tanpa meminta pemohon untuk mendatangi kantor layanan. Layanan yang diberikan mencakup konsultasi perizinan, denah bangunan, pemenuhan cara pembuatan obat tradisional yang baik (OPOTB), dan persyaratan izin edar produk. Jika diperlukan, petugas/fasilitator dapat menjadwalkan kunjungan ke sarana pemohon untuk memberikan layanan pendampingan.

Pendampingan UMKM pro-aktif di

bidang OBA mulai dilaksanakan sejak tahun 2022 dan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan. Hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah produk layanan yang dihasilkan.

Pada 2022, terdapat peningkatan jumlah Sertifikat OPOTB sebesar 78,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari segi tingkat keberhasilan, 52,6% pelaku usaha yang didampingi berhasil memperoleh Sertifikat OPOTB dan/atau izin edar pada tahun 2022 dan 51,4% pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan kebijakan layanan publik pro-aktif memiliki dampak signifikan, namun masih perlu ditingkatkan implementasinya.

Kebijakan layanan publik pro-aktif mendapat sambutan baik dari pelaku usaha OBA. Direktur PT Desoil, Denpasar, Fransisco Syenil (Sisaa), Ia menyatakan, "Agar pemasaran produk lebih maksimal, ternyata diperlukan izin BPOM. Kami mulai mencari tahu dan datang langsung ke BBPOM di Denpasar dan disambut baik dan diberitahu informasi yang kami butuhkan."

"Saat kami ingin melakukan pembangunan pabrik, kami meminta rekomendasi denah ke BBPOM Denpasar melalui WhatsApp dan direspons dengan baik sehingga dalam 2 hari kerja, denah kami telah disetujui/[diberikan] rekomendasi. Setelah denah disetujui, kami melakukan pembangunan pabrik dengan tetap berkomunikasi dengan BBPOM Denpasar. Proses OPOTB kami memakan waktu 3 bulan sampai Sertifikat OPOTB keluar. Setelah sertifikat keluar, kami segera mendaftarkan produk kami. Dalam waktu 3 bulan produk pertama

Data UMKM yang Berhasil Didampingi



Grafik UMKM Obat Bahan Alam yang Berhasil Didampingi

kami langsung keluar izin edarnya," tutur Sisaa berbagi pengalamannya dalam mengurus perizinan produk ke BPOM.

Hal senada juga disampaikan oleh pemilik OV Tulus Banyu, Jakarta, Nugroho Risgianto. "Kami memulai usaha di Februari 2023. Kami membutuhkan izin edar dan [waktu mengurus proses] produksi dari mulai mengurus dan dibimbing oleh BPOM kira-kira 3 bulan untuk peralihan sampai uji produk. Prosesnya cukup jelas dan membantu untuk meningkatkan mutu produk kami, sampai akhirnya November 2023 mendapatkan izin edar dari BPOM. Harapannya, ke depan BPOM dapat membantu usaha-usaha kecil yang tumbuh di masyarakat, khususnya produk obat, makanan, dan kosmetik," ungkapnya.

Peningkatan layanan publik di bidang OBA tentunya tidak berhenti dengan kebijakan layanan publik pro-aktif saja. BPOM juga memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha melalui simplifikasi persyaratan perizinan, penerapan OPOTB bertahap bagi UMKM, bantuan pengujian oleh laboratorium unit pelaksana teknis BPOM dalam rangka registrasi produk, keringanan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pelayanan publik. Selain itu, BPOM juga mengupayakan peningkatan akses pasar melalui berbagai program, seperti melalui kegiatan Wellfest 2024: Natural Beauty and Wellness dan UMKM Meet Market, yang memungkinkan pelaku usaha bertemu langsung dengan calon pelanggan/konsumen dan membuka potensi terjadinya transaksi di antara keduanya. ■



Oleh : Nur Annisa Rahmah
Editor : Fathah Nur Hamidi

KOMPAK Pangan: Sinergi dan Solusi untuk Keamanan Pangan UMK Steril Komersial

Teknologi pengolahan pangan steril komersial tengah diminati industri pangan termasuk usaha mikro kecil (UMK). Keuntungan masa simpan yang lama serta kemudahan distribusinya pada suhu ruang, memungkinkan produk ini merambah pasar global. Namun di balik itu, ada risiko keamanan pangan yang tinggi jika proses sterilisasi tidak dilakukan dengan sempurna.

Pertumbuhan industri pangan olahan di Indonesia telah menunjukkan tren yang mengesankan. Iklim usaha di sektor pangan yang positif menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi bahkan di masa pandemi. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2023, industri makanan memberikan kontribusi sebesar 39,10% pendapatan domestik bruto (PDB) industri non migas dan 6,66% PDB nasional. Jika dikonversikan angka ini mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar 25,21 miliar USD dan realisasi investasi mencapai Rp86,10 triliun.

Di dalam ekosistem ini, UMK pangan olahan memiliki kontribusi yang sangat penting. Peran UMK tidak bisa dipandang sebelah mata dalam penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apa lagi produk UMK terus berkembang merangsek pasar. Hal ini salah satunya bisa ditelusuri lebih jauh dari meningkatnya penerbitan nomor izin edar (NIE) untuk produk UMK.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyoroti peran vital usaha mikro, kecil (UMK) pangan dalam mendukung perekonomian nasional dan mewujudkan swasembada pangan. "Pangan adalah kebutuhan mendasar, dan kita harus mampu memenuhinya secara mandiri. UMKM adalah modal penting dalam



Peningkatan Jumlah NIE yang diterbitkan untuk Produk UMK

memajukan bangsa dan mencapai swasembada pangan yang menjadi tujuan utama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," terang Kepala BPOM.

Seiring bertumbuhnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, peminatan terhadap pangan kuliner tradisional nusantara juga mengalami peningkatan. Terutama bentuk pangan olahan yang terkemas karena praktis siap dikonsumsi kapan saja. Pangan terkemas umumnya diproses dengan pemanasan setelah dikemas dalam kaleng atau *retortable pouch*. Pangan jenis ini dikenal sebagai pangan steril komersial. Pangan olahan yang dimaksud seperti gudeg, rendang,

empal gentong, sate rembiga, dan pempek dalam kemasan kaleng atau *pouch*.

Pangan steril komersial menjadi *game changer* dalam pemenuhan kebutuhan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mendorong terwujudnya *gastrodiplomacy* dari kuliner nusantara terkemas yang dibawa ke seluruh penjuru dunia. Usaha pangan steril komersial kuliner nusantara tersebut umumnya merupakan UMK yang mengharapkan keuntungan dari perpanjangan umur simpan produk serta kemudahan distribusinya pada suhu ruang. Dengan spesifikasi ini sangat memungkinkan pangan steril komersial diekspor hingga ke mancanegara. Bahkan pangan steril komersial dapat dimanfaatkan untuk darurat bencana dan ransum militer.

"Pangan steril komersial memainkan peran penting dalam menjaga kualitas pangan olahan Indonesia agar mampu bersaing di pasar global".

**- Kepala BPOM,
Taruna Ikrar -**



Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan arahan pada Forum Koordinasi Nasional Pangan Steril Komersial, Yogyakarta (22/10/2024).

Tantangan Pangan Steril Komersial

Tren peningkatan minat UMK di bidang usaha pangan steril komersial ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah permohonan izin penerapan program manajemen risiko (IP PMR). Kewajiban penerapan PMR untuk UMK secara bertahap telah diatur secara khusus di Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Manajemen Risiko di Sarana Produksi Pangan Olahan.

Namun demikian, di sisi lain UMK pangan olahan seringkali menghadapi kendala terkait keterbatasan pengetahuan, teknologi, serta akses terhadap sumber daya yang mendukung pemenuhan standar. Keterbatasan UMK tersebut menjadi tantangan besar bukan hanya bagi pelaku usaha UMK namun juga bagi BPOM sebagai lembaga pengawas karena berdampak pada pemenuhan regulasi keamanan pangan. Misalnya, dalam penggunaan alat pengolahan, UMK dengan segala keterbatasannya mempersepsikan mesin retort sebagai mesin ajaib yang dapat menyelesaikan berbagai isu keamanan pangan namun tidak memahami spesifikasi standar dan tidak tervalidasi prosesnya.

Sementara itu, dalam pengolahan pangan steril komersial diperlukan standar produksi yang ketat. Jika abai, maka bisa saja berisiko menyebabkan sakit atau bahkan kejadian luar biasa keamanan pangan (KLB-KP). Kondisi ini terjadi akibat toksin botulin yang dihasilkan oleh

mikroorganisme *Clostridium botulinum* apabila pengolahannya tidak diproses dengan benar.

"Jika proses panas tidak memadai, spora *Clostridium botulinum* dapat menghasilkan racun *botulinum*, yang memiliki efek neurotoksin berbahaya. Karena itu, kami menerapkan manajemen risiko yang ketat bagi UMK pangan steril komersial," jelas Taruna Ikrar.

Insiden ketidakpatuhan yang berujung pada isu keamanan pangan berpotensi merusak reputasi produk lokal dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Sementara itu di tengah persaingan global, produk pangan Indonesia dituntut untuk memenuhi standar internasional agar dapat bersaing di pasar dunia.

Merujuk penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2016 berjudul "Estimation of Economic Loss due

to Food Poisoning Outbreaks", pada tahun 2021 Harian Kompas menghitung estimasi dampak kerugian akibat kejadian KLB KP mencapai Rp109,68 miliar. Kerugian itu tidak hanya berimbas pada anggaran kesehatan pemerintah saja, tetapi juga berdampak pada pengeluaran masyarakat.

Gerakan Kolaboratif Keamanan Pangan

Isu keamanan pangan yang membayangi pangan steril komersial perlu direspon segera oleh pemerintah selaku regulator. Pemenuhan standar dan regulasi keamanan pangan bagi UMK pangan steril komersial merupakan kunci untuk mengatasi permasalahan yang ada. Meski kerap kali menghadapi tantangan, UMK pangan steril komersial harus terus didorong untuk tumbuh dan berkembang.

Sebagai langkah inovatif, BPOM menginisiasi program "KOMPAK Pangan" atau Kolaborasi Bersama untuk Peningkatan Kepatuhan Usaha Mikro Kecil Pangan Steril Komersial. "Salah satu langkah konkret yang kami lakukan dengan mendorong penguatan UMKM pangan, termasuk melalui teknologi pangan steril komersial," jelas Taruna Ikrar.

KOMPAK Pangan sebagai gerakan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu memecah kebuntuan. Dengan inovasi ini stakeholder terkait dapat menciptakan ekosistem yang saling mendukung untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan jaminan keamanan pangan UMK pangan steril komersial.

Melalui Gerakan KOMPAK Pangan ini juga diharapkan dapat meningkatkan



Kepala BPOM Taruna Ikrar foto bersama lintas sektor usai penandatanganan komitmen Kolaborasi Penguatan UMK Pangan Steril Komersial dalam Forum Koordinasi Nasional Pangan Steril Komersial, Yogyakarta (22/10/2024).



jumlah IP PMR bertahap Tahap 1 hingga 40% setiap tahunnya dan meningkatkan jumlah NIE produk pangan steril komersial dari UMK sebanyak 6 kali lipat. Harapannya gerakan ini mampu berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi UMK pangan steril komersial sebesar Rp130 miliar per tahun.

Saat ini baru 358 produk pangan steril komersial yang memperoleh NIE dari 7.526 sarana produksi pangan dengan skala UMK termasuk UMK pangan steril komersial. Dari sejumlah sarana ini, BPOM telah mendampingi 41 UMK pangan steril komersial dengan produk kuliner tradisional.

Ke depan BPOM berkomitmen terus memberikan pendampingan kepada pelaku UMK pangan olahan melalui pengawalan dan fasilitasi serta pembinaan intensif meliputi audit dan supervisi sarana UMK. Kerja sama dengan Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan IPB juga dilakukan untuk mengembangkan pedoman proses sterilisasi generik agar UMK dapat dengan mudah melakukan proses sterilisasi sesuai standar.

Inovasi Sokong Pertumbuhan

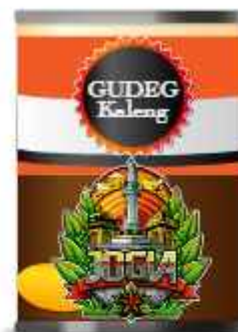
Salah satu solusi yang menjadi output program KOMPAK Pangan adalah penerbitan Pedoman Proses Terjadwal Generik untuk UMK yang memberikan

penjelasan komprehensif terkait kebutuhan validasi proses sterilisasi dan mudah diaplikasikan. Selain itu, inovasi utama yang dihadirkan dalam KOMPAK Pangan adalah aplikasi "One Stop Digital Solution" yang dapat diakses melalui www.wasprod pangan.pom.go.id/osds.

Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi UMK pangan steril komersial dalam mengakses informasi dan mempelajari regulasi. Pelaku UMK juga bisa mendalami persyaratan teknis produksi dan keamanan pangan termasuk aspek bisnisnya. Lebih dari itu, mereka mendapatkan jejaring saluran komunikasi dengan lintas sektor dan penyedia jasa.

Gerakan KOMPAK Pangan tidak hanya terbatas pada pengembangan teknologi digital. Forum Koordinasi Nasional Pangan Steril Komersial hadir sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan dalam membangun sinergi, bertukar informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam penerapan regulasi. Melalui forum ini juga akan dikembangkan mekanisme rekognisi bagi personil kompeten di bidang kecukupan panas.

Selain itu, BPOM tengah melakukan penguatan *branding* Inspektur Pangan BersiNaR "Bersih, Sigap, Nasionalis, dan Ramah" dengan menghadirkan



Pangan Steril Komersial Kuliner Tradisional Nusantara

sosok pengawas pangan yang tidak hanya kompeten dan tegas, namun juga ramah dan siap membantu UMK untuk tumbuh. *Branding* ini merepresentasikan pendekatan yang bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan UMK, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mematuhi regulasi.

Melalui KOMPAK Pangan diharapkan tercipta sinergi yang solid untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh UMK secara kolektif. Dengan demikian terbangun ekosistem bagi UMK dalam memproduksi pangan steril komersial yang aman dan memenuhi standar. Pada akhirnya produk yang dihasilkan dapat menjadi solusi untuk peningkatan kebutuhan gizi, potensi ekonomi, dan sektor pariwisata. ■

Fitur One Stop Digital Solution Pangan Steril Komersial

1. **One Stop Digital Learning**, melalui fasilitas: pembelajaran modul secara mandiri oleh UMK (*free acces any time*), dan kelas digital berupa pembelajaran 2 arah terjadwal dengan narasumber langsung secara *online* maupun *offline*.
2. **One Stop Window Solution**, memuat saluran informasi: penyedia peralatan, kemasan, jasa pengujian, ataupun validasi kecukupan panas yang terstandar serta tenaga kompeten kecukupan panas yang diakui. Fitur ini juga dilengkapi aplikasi untuk menghitung proses terjadwal generik yang tepat sesuai produk yang diolah dan jenis kemasannya.
3. **One Stop Link and Match**, jembatan informasi antara UMK dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah maupun pemilik dana CSR serta industri yang mengikuti program Orang Tua Angkat (OTA) yang dapat memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, termasuk pelibatan dalam kegiatan promosi dan pameran.



Kalendar Pelatihan



Tahukah Kamu

PANGAN STERIL KOMERSIAL

adalah pangan berasam rendah yang dikemas secara **hermetis***, disterilisasi komersial dan disimpan pada suhu ruang. Dengan karakteristik pH lebih besar dari 4,6 dan aktivitas air (aW) lebih besar dari 0,85.

* Hermetis adalah kondisi kemasan tertutup yang dapat mencegah masuknya mikroorganisme selama dan setelah proses pemanasan. Contoh: susu dalam pouch, susu dalam karton laminat, ikan



Contoh: susu dalam pouch, susu dalam karton laminat, ikan kaleng, olahan ayam dalam botol kaca, dan minuman kopi mengandung susu dalam gelas/botol.

Peringatan!

Pangan steril komersial berisiko tinggi terhadap pertumbuhan bakteri patogen *Clostridium botulinum* karena bakteri bersifat anaerob (tidak membutuhkan oksigen). *C. botulinum* menghasilkan racun yang berbahaya yaitu toksin botulinum atau racun yang menyerang sistem saraf (neurotoksin).

TIPS

Memilih pangan steril komersial yang aman

1

Ingat selalu Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar dan Kedaluwarsa)



Pastikan kemasan dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak penyok, tidak menggembung, tidak berkarat, dan tidak terbuka segelnya.



Pastikan label produk memberikan informasi dalam bahasa Indonesia.



Pastikan produk terdaftar di BPOM dengan melakukan pengecekan izin edar dan melalui aplikasi BPOM Mobile <https://cekbpom.pom.go.id/>

EXP.
05/04

Pastikan produk tidak melewati tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada kemasan.

2

Simpan produk sesuai petunjuk penyimpanan pada kemasan.

Fakta



Toksin botulinum adalah salah satu zat paling beracun, bahkan dalam jumlah sangat kecil dapat menyebabkan penyakit atau kematian.



Toksin botulinum memblokir fungsi saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan pernapasan dan otot.



Keracunan yang diakibatkan oleh toksin botulinum dikenal dengan istilah botulisme, yaitu saat toksin memblokir fungsi saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan pernapasan dan otot.



Gejala awal botulisme yaitu sakit kepala, lemas, vertigo, biasanya disertai pandangan kabur, mulut kering, susah menelan dan berbicara. Dapat juga timbul muntah, diare, konstipasi dan kram perut. Keparahan akan meningkat menjadi lemas otot leher dan lengan setelah muncul efek pada otot pernapasan dan anggota tubuh bagian bawah.



Meskipun kejadian botulisme jarang, namun harus diwaspadai karena bisa berakibat fatal. Jika tidak ditangani dengan segera dan tepat dapat menyebabkan kematian (5-10% kasus).



Lakukan Cek KLIK untuk pastikan pangan steril komersialmu aman..



Oleh : Dewi Nurjannah
Editor : Dian Hermawati

Kolaborasi Pemangku Kepentingan Tertibkan *Skincare* Etiket Biru Tak Sesuai Ketentuan

Peredaran *skincare* dengan label biru kini menjadi tren yang disoroti oleh masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) tahun 2023, ditemukan efek berbahaya dari penggunaan *skincare* beretiket biru hampir di seluruh kota di Indonesia dengan angka temuan tertinggi terjadi di Jakarta, Semarang, Makassar, dan Bandung.

Fenomena peredaran *skincare* beretiket biru telah menjadi fokus pengawasan BPOM. Sejak tahun 2023, BPOM telah menginisiasi program penanganan peredaran *skincare* beretiket biru berkolaborasi dengan stakeholder terkait, yaitu kementerian/ lembaga, asosiasi profesi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, komunitas masyarakat, serta media.

Istilah etiket sebenarnya merupakan penandaan untuk label sediaan obat, yang terdiri dari etiket putih dan etiket biru, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Etiket putih digunakan untuk label obat yang digunakan dengan cara diminum atau disebut "obat dalam", sedangkan etiket biru merupakan penandaan untuk obat yang digunakan pada bagian luar tubuh (atau disebut "obat luar"), seperti salep dan krim yang digunakan dengan cara dioles.

Produk yang mengandung bahan obat dengan etiket biru dan tujuan penggunaan estetis atau kecantikan, yang dikenal sebagai *skincare* beretiket

biru, seharusnya hanya dapat digunakan atas rekomendasi dokter berdasarkan kondisi kulit masing-masing pasien, yang mungkin berbeda-beda kebutuhannya. Karena itu, *skincare* beretiket biru hanya dapat diperoleh di apotek dengan resep dokter dan bersifat personal (tidak boleh diproduksi secara massal).

Akan tetapi, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di pasaran, BPOM menemukan produksi *skincare* beretiket biru secara massal. Produksi massal ini pun melibatkan peran sarana produksi kosmetik legal serta keterlibatan berbagai pihak, antara lain sarana distribusi (seperti klinik kecantikan) serta profesi kesehatan, dalam hal peredaran maupun sumber perolehan bahan bakunya secara ilegal. Dengan pelanggaran yang melibatkan berbagai pihak ini, diperlukan upaya penanganan komprehensif oleh seluruh pemangku kepentingan.

Bahan obat yang ditemukan disalahgunakan pada *skincare* beretiket biru, antara lain hidrokuinon, asam retinoat, serta golongan steroid. Efek berbahaya dari penggunaan *skincare* etiket biru yang tidak sesuai ketentuan

dapat menimbulkan gejala pada kulit, seperti dermatitis kontak, okronosis, urtikaria, hiperpigmentasi, dan efek kesehatan lainnya. Efek berbahaya yang timbul dapat berbeda tergantung bahan yang terkandung pada produk yang digunakan.

Peredaran *skincare* beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan, selain berisiko terhadap kesehatan, juga berkontribusi negatif terhadap daya saing produk kosmetik legal. Tren *skincare* beretiket biru ini terjadi karena tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kosmetik berlabel "racikan dokter" yang diyakini dapat memberikan efek instan, serta kurangnya literasi tentang bahaya penggunaan *skincare* beretiket biru secara bebas.

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Optimalkan Pengawasan

Sebagai upaya menertibkan peredaran *skincare* beretiket biru, BPOM berkolaborasi dengan pemangku kepentingan melalui berbagai upaya, seperti pengawasan, penindakan, pembinaan serta edukasi. Kesepakatan kolaborasi telah tertuang dalam



Etiket biru

Merupakan penandaan untuk obat luar yang digunakan dengan cara dioles, seperti salep dan krim.

Skincare Beretiket Biru

yang tidak sesuai ketentuan merupakan istilah untuk produk perawatan kulit yang ditambahkan bahan obat (keras), yang dibuat secara massal dan dilabeli etiket biru, umumnya didistribusikan secara online, tanpa resep ataupun pengawasan dokter.

komitmen bersama antara BPOM dan Asosiasi Profesi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), serta Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) pada 6 Mei 2024.

Para pemangku kepentingan lainnya juga menyampaikan dukungan terhadap penanganan *skincare* beretiket biru, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indonesian E-Commerce Association (idEA), Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, perwakilan asosiasi pelaku usaha, serta *public figure*. Wujud nyata dari langkah kolaborasi ini adalah dengan upaya tiap lembaga untuk dapat melakukan penanganan baik secara mandiri maupun kolaborasi sesuai dengan kewenangannya. Contoh kegiatannya adalah dengan turut serta mengedukasi masyarakat dalam penggunaan *skincare* beretiket biru dengan tepat dan sesuai regulasi. Dalam menggaungkan edukasi kepada masyarakat tersebut, BPOM mengusung program kampanye nasional dan menyebarkan media publikasi bertema “*Skincare Beretiket Biru Tidak untuk Semua*”.

Dari aspek pembinaan, peredaran *skincare* beretiket biru terkait erat dengan tenaga kesehatan dan tenaga medis, seperti dokter dan apoteker. Kolaborasi BPOM dalam aspek ini dilakukan dengan tahapan *pilot project* pembinaan kepada anggota profesi kesehatan di beberapa wilayah Indonesia. Dengan pembinaan kepada profesi dokter dan apoteker yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat memastikan edukasi tentang penggunaan *skincare* beretiket biru yang sesuai ketentuan.

Selain upaya edukasi dan pembinaan, BPOM juga telah melakukan penindakan terhadap sarana ilegal yang menggunakan bahan dilarang pada kosmetik, yang juga digunakan pada *skincare* beretiket biru. Pada temuan kasus tersebut, terungkap data pemesanan produk ilegal dari ribuan dokter yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Upaya penindakan terhadap sarana ilegal telah ditegakkan, namun diperlukan intervensi terhadap para dokter yang telah terbukti memiliki



keterlibatan dalam peredarannya.

Untuk penanganan hal tersebut, BPOM berkolaborasi dengan IDI melakukan identifikasi dan pendekatan persuasif terhadap para dokter yang memiliki keterlibatan peredaran *skincare* beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan. Langkah tersebut mempertimbangan adanya faktor manipulatif dari pelaku yang menawarkan produk kepada para dokter seolah merupakan produk legal, serta adanya faktor kurangnya pemahaman para dokter terhadap regulasi mengenai peredaran *skincare* beretiket biru.

Sebagai bagian dari upaya kolaboratif tersebut, BPOM menggelar Forum Komunikasi Penertiban *Skincare* Beretiket Biru yang Tidak Sesuai Ketentuan (24/7/2024). Forum dihadiri lebih dari 600 peserta dari profesi bidang kesehatan baik secara luring maupun daring dari

seluruh wilayah di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, BPOM berdialog dengan para tenaga kesehatan dan medis sekaligus kembali menegaskan dampak negatif penggunaan *skincare* beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan pada pasien, serta sanksi asosiasi profesi (IDI) sesuai kode etik anggota yang melakukan pelanggaran.

Melalui forum ini, BPOM berharap agar para tenaga kesehatan berkomitmen melaksanakan praktik sesuai dengan regulasi sediaan farmasi dan kode etik profesi agar terhindar dari risiko hukum. Selain itu, juga diharapkan agar tenaga kesehatan turut mengedukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan promosi *skincare* yang menjanjikan efek instan, termasuk penggunaan *skincare* beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan. ■



Kemandirian Fraksionasi Plasma Dalam Negeri untuk Masa Depan



Ditah : Dwi Ary Restuti
Editor : Fathan Nur Hamidi

Kandungan protein dan antibodi dalam plasma darah manusia merupakan bagian penting dalam pengobatan. Banyak masalah kesehatan yang serius dapat teratasi dengan terapi ini. Terutama untuk kondisi kronis yang langka, termasuk gangguan autoimun dan hemofilia.

Plasma darah adalah komponen terbanyak dari darah manusia, yaitu sekitar 55% dari seluruh volume darah. Plasma darah terdiri dari 92% air yang berfungsi membantu mengisi pembuluh darah sehingga membuat darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. Sementara itu, 8% plasma terdiri dari bahan-bahan penting, seperti protein, immunoglobulin, dan elektrolit.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia, Indonesia memiliki sumber daya potensial dalam pengembangan produk obat derivat plasma (PODP). Saat ini, pemanfaatan plasma darah di Indonesia masih belum maksimal. Data Palang Merah Indonesia tahun 2023 menyebut setiap tahunnya hanya sekitar 1–10% plasma darah yang digunakan dalam pelayanan pasien. Selebihnya plasma darah yang seharusnya dapat digunakan sebagai bahan awal pembuatan PODP akan dibuang menjadi limbah. Hal ini karena Indonesia belum memiliki fasilitas fraksionasi plasma untuk mengolah plasma darah tersebut menjadi PODP. Situasi ini mengakibatkan, Indonesia bergantung 100% pada PODP impor untuk memenuhi kebutuhan PODP dalam pelayanan pasien.

Jenis PODP yang Diimpor



Nilai Importasi PODP (Triliun Rp)



Kandungan Protein Dalam Plasma Darah

01

Albumin

Berperan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Protein ini bertugas untuk menjaga agar cairan dalam pembuluh darah tidak bocor dan membesi ke jaringan.

02

Globulin

Sejenis immunoglobulin yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Kandungan tersebut membantu tubuh melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan virus.

03

Fibrinogen

Berperan dalam proses pembekuan darah dengan membantu mengurangi pendarahan akut.

04

Immunoglobulin atau Antibodi

Menghambat serangan bakteri dan virus yang berusaha masuk sel-sel dalam tubuh.

Dorong Industri Dalam Negeri

Importasi PODP di Indonesia dalam 5 tahun terakhir (2019–2023) terus meningkat. Karena itu kemandirian industri fraksionasi plasma dalam negeri menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, yang di dalamnya termasuk kemandirian fraksionasi plasma dalam negeri.

Pelaksanaan kemandirian fraksionasi plasma dalam negeri melibatkan 2 aspek. Pertama jaminan tersedianya suplai plasma darah yang aman, dan berkualitas sebagai bahan baku PODP. Kedua memprioritaskan penggunaan PODP yang diproduksi dengan plasma yang bersumber dari dalam negeri. Apa lagi saat ini Indonesia belum memiliki fasilitas produksi fraksionasi plasma dalam negeri.

Kebijakan Fraksionasi Plasma

Melaksanakan fraksionasi plasma berdasarkan *contract plasma fractionation (CPF)* dengan fasilitas fraksionasi plasma di luar negeri. Permenkes Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Darah, membuka ruang bagi industri farmasi swasta dalam negeri untuk memproduksi PODP.

Roadmap CPF ini diharapkan hanya berlangsung selama 2 tahun sampai 2026, sambil menyiapkan fasilitas fraksionasi dalam negeri yang tidak hanya membutuhkan investasi yang besar. Namun juga perlu menyiapkan teknologi dan infrastruktur yang memadai, personil yang kompeten, serta bahan baku plasma yang bermutu.

Sertifikasi CPOB bagi fasilitas penyuplai plasma darah dalam rangka pemastian mutu plasma darah yang akan digunakan sebagai bahan baku dalam fraksionasi plasma. Fasilitas penyuplai ini adalah Unit Donor Darah (UDD) PMI dan Unit Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit Vertikal yang ditunjuk.

Wajib Sertifikasi CPOB

Penjaminan mutu plasma oleh UDD PMI maupun UTD Rumah Sakit sebagai pengelola plasma darah yang akan menyuplai fasilitas fraksionasi plasma harus memenuhi aspek mutu, keamanan, dan mutu. Mengacu Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis, tahapan dari proses seleksi donor, pengambilan darah/plasma, pengolahan, pengujian, sampai dengan penyimpanan dan distribusi plasma darah. Seluruh proses wajib mengikuti persyaratan cara pembuatan obat yang baik (CPOB).

BPOM terus mengawal proses fraksionasi plasma menuju kemandirian PODP melalui penerapan sertifikasi CPOB. Hal ini merupakan amanat pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Perkembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Sampai dengan Agustus 2024, BPOM telah menerbitkan 22 Sertifikat CPOB terhadap fasilitas penyuplai plasma darah untuk fraksionasi plasma, yang terdiri dari 19 UDD PMI dan 3 UTD rumah sakit vertikal. BPOM terus berupaya mendukung penjaminan mutu plasma darah dan peningkatan jumlah fasilitas UDD yang tersertifikasi CPOB dalam rangka pemenuhan suplai plasma darah untuk fraksionasi plasma.

Keterlibatan BPOM dalam sertifikasi CPOB di UDD PMI dan UTD rumah sakit vertikal dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu peningkatan kompetensi

personil UDD PMI dan UTD rumah sakit, konsultasi, asistensi regulatori, evaluasi dokumen dan pelaksanaan pemeriksaan setempat. Secara internal, UDD PMI dan UTD Rumah Sakit juga perlu melakukan banyak perubahan dan perbaikan.

Peningkatan Perbaikan UDD MI dan UTD RS

Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas: bangunan memadai, area sesuai persyaratan sanitasi dan keamanan, alur personal dan alur proses sesuai persyaratan CPOB, peralatan yang memadai untuk pemrosesan, pengujian dan penyimpanan plasma darah.

Pelatihan dan Pendidikan: identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan kompetensi dan pemenuhan kualifikasi tiap jabatan/personal, pelatihan berkelanjutan, evaluasi efektivitas.

Peningkatan Sistem Manajemen Mutu: pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu yang komprehensif yang mencakup seluruh aspek, termasuk penanganan limbah, pengendalian hama, pemantauan lingkungan.

Pemantauan dan Evaluasi Mutu: pelaksanaan sistem pemantauan mutu dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa plasma darah untuk fraksionasi plasma memenuhi spesifikasi dan mutu yang ditetapkan.

Demi mendukung percepatan Sertifikasi CPOB, UDD PMI dan UTD Rumah Sakit harus memantapkan komitmennya dalam memenuhi standar yang ditetapkan untuk menyediakan plasma darah yang berkualitas. Pelaksanaan proses donor darah yang sesuai persyaratan CPOB merupakan *entry gate* dalam menghasilkan plasma darah untuk fraksionasi plasma yang aman dan bermutu. ■





6
Tuh kan Tiwi,
jamunya gak
terdaftar di
BPOM



7
Astaghfirullah Seno, jamu ayah
kamu muncul di aplikasi e-Pen-
jelasan Publik OT&SK, itu ada
kandungan parasetamol dan
natrium diklofenak.



8
Ya Allah
Aku telefon
ayahku sekarang
deh.



9
Halo Ayah, ini obatnya gak baik buat Ayah.
Aku cek di aplikasi BPOM dan ada kandungan
bahan kimia obatnya, yang harusnya gak
boleh ada di jamu. Berhaya ini, Yah..

Ya Allah, untung
Ayah baru
minum sekali.
Makasih ya, Nak..

Pertama, pilih
akan yang
tepatnya, pilih
yang banyak
pembeliannya

Iya, Yah. Oiya
Yah, Seno punya
tip kalo Ayah
mau beli jamu di
online lagi

Gimana Seno?
Aman tadi telefon
ayahnya?



Kedua, lihat foto
produknya, kalau
ada klaim instan
atau cepleng
atas khasiat yang
berlebihan, gak
usah dibeli.

Tertus yang ketiga,
cek izin edar
produknya, bisa
dilihat di deskripsi
produk atau ayah
instal aplikasi BPOM
Mobile terus cari deh
nama produknya di
pilihan pencarian
nama produk, kalau
gak muncul berarti
gak ada izin edarnya.
jangan dibeli

Yeu, yaudah oke
Yah.

Iya tyu,
maksud ya Nak
tapiya. Nanti
Ayah tanya kamu
aja deh kalo mau
beli hahaha



11
Aman Tiwi. Yok, kerja lagi,
tabungan nikah gak bisa
kalo sendiri nih kalo gak
kerja.

Mantap. Emang
kamu mau nikah
sama siapa?

Kamu lah.

Yeuuh



Progres Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN): Pondasi Masa Depan Indonesia Langkah Awal Menuju Pusat Pemerintahan Baru yang Benar-benar Berwawasan Lingkungan dan Teknologi, (26/9/2024).



Oleh : Yanuar Rahman
Editor : Fathan Nur Hamidi

Menuju Ibu Kota Nusantara: Membangun Kesiapan Infrastruktur dan SDM

Pulau Kalimantan kini terasa ada yang berbeda. Masa depan Indonesia akan dimulai dari sini. Tepat di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan kekayaan alamnya, hutan-hutan yang lebat, sungai-sungai yang jernih, dan pegunungan yang memukau menciptakan pemandangan yang mempesona. Pembangunan IKN menjadi penanda bagaimana pemerintah serius menata negeri ini ke depan.

Indonesia sentris dengan konsep kota hijau merupakan perpaduan yang pas untuk keseimbangan keberlanjutan ekosistem Nusantara. Pelestarian alam dikedepankan dengan banyak ruang terbuka hijau dan taman yang mengintegrasikan elemen alam ke dalam desain kota. Istana Negara dan Istana Garuda mulai berdiri kokoh dan akan diresmikan Oktober 2024, setelah sebelumnya digunakan untuk Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI.

Bangunan gedung-gedung pemerintah dan fasilitas penunjang lain pun satu persatu dibangun. Lalu bagaimana dengan masa depan BPOM? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pusat pemerintahan pindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Dalam rencana pemindahan kantor kementerian/lembaga ke IKN, BPOM menjadi prioritas ke-4 pemindahan kantor ke IKN.

Pemindahan ibu kota negara ke IKN bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga membangun paradigma baru dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik. Salah satu lembaga yang turut merasakan dampak pemindahan ini adalah BPOM.

Sebagai lembaga vital dalam pengawasan obat dan makanan, BPOM kini tengah mempersiapkan rencana infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengawal kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dari IKN.

Pemerintah telah menargetkan pemindahan sebagian besar lembaga pemerintahan, termasuk BPOM, ke IKN sebagai salah satu upaya memecah konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa dan menciptakan pemerataan di berbagai sektor. IKN, yang berlokasi di Kalimantan Timur, dirancang dengan konsep *smart city* dan *eco-city*, di mana teknologi serta kelestarian lingkungan menjadi landasan utama. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur berlandaskan konsep pembangunan ramah lingkungan. Dengan luas area 266.000 hektar, pembangunan hanya akan dilakukan pada 66.000 hektar area dengan menyisakan sebagian besar area lainnya sebagai kawasan hijau/hutan.

Infrastruktur sebagai Fondasi Awal

Pemindahan BPOM ke IKN dianggap strategis untuk memperkuat peran pengawasan obat dan makanan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. BPOM telah mengajukan jumlah pegawai dan luas lahan yang rencananya akan dimanfaatkan sebagai kantor BPOM. Kantor BPOM akan dibangun di lahan seluas 8.810 m². Sedangkan rencana pemindahan 673 pegawai ASN ke IKN ini nantinya akan dilakukan secara bertahap.

Saat ini sudah terdapat 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah penyangga IKN yaitu Balai POM di Tarakan; Loka POM di Balikpapan; dan Balai Besar POM di Samarinda. Sejak tahun 2021, 3 UPT di wilayah penyangga IKN tersebut telah melakukan penguatan infrastruktur mulai dari bangunan laboratorium hingga pemenuhan peralatan laboratorium sebagai wujud dukungan BPOM terhadap pengawasan obat dan makanan di wilayah IKN.

Pembangunan kantor dan laboratorium BPOM di IKN penting dilakukan dengan fokus kepada pengembangan dan pengujian obat dan makanan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong BPOM untuk mengajukan tambahan anggaran khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana di IKN terutama laboratorium. Laboratorium

BPOM di IKN akan difungsikan untuk mengawasi produk obat dan makanan yang beredar di wilayah IKN dan sekitarnya, termasuk untuk pemeriksaan dan pengujian obat dan makanan bagi Pimpinan dan tamu negara.

Usulan pembangunan laboratorium dan prasarana lainnya masih terus dibahas untuk menentukan kebutuhan jangka menengah dan juga jangka panjang, sehingga jelas perbedaan antara fungsi laboratorium di IKN dengan laboratorium di Jakarta. Hasil pembahasannya akan disampaikan kepada Bappenas dan diharapkan dapat dipenuhi. Sedangkan layanan publik BPOM di IKN akan dilakukan penguatan. Termasuk penguatan sarana dan prasarana di UPT penyangga IKN.

Pemindahan ini tentu memerlukan persiapan matang, terutama dari sisi infrastruktur. BPOM yang bertanggung jawab memastikan keamanan dan kualitas obat, makanan, serta kosmetik di Indonesia, membutuhkan fasilitas laboratorium yang canggih dan pusat pengawasan modern. Fasilitas ini meliputi laboratorium pengujian standar internasional, pusat data yang terintegrasi, dan sistem teknologi informasi yang mampu memproses dan menganalisis data dengan cepat dan akurat.

Pembangunan perkantoran di IKN dilakukan secara bertahap sekaligus dengan pemindahannya. Rencananya BPOM akan pindah ke IKN pada tahun 2027. Dengan visi pembangunan berkelanjutan, BPOM diharapkan dapat menjadi salah satu lembaga vital yang akan turut serta menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di kawasan ini.

Mempersiapkan SDM Unggul

Selain infrastruktur fisik, keberhasilan pemindahan ini sangat bergantung pada kesiapan SDM yang akan mengoperasikan fasilitas baru tersebut. BPOM menyadari peran pengawasan akan semakin besar seiring dengan perkembangan industri farmasi termasuk kosmetik dan makanan yang terus meningkat. Karena itu, BPOM terus melakukan peningkatan kapasitas bagi pegawainya untuk menghadapi era digital, isu serta tantangan ke depannya.

Taruna Ikrar menekankan harapannya agar BPOM berperan penting dalam

"Pemindahan BPOM ke IKN adalah langkah strategis sebagai peluang besar untuk memperkuat peran BPOM dalam menjaga keamanan obat dan makanan di seluruh Indonesia"

- Kepala BPOM, Taruna Ikrar -



pengawasan di wilayah strategis. "Saya yakin apa yang menjadi misi utama kita untuk melindungi keamanan obat dan makanan khususnya kualitas dari obat dan makanan, itu bisa mengangkat reputasi kita sebagai lembaga negara yang bisa diandalkan oleh masyarakat," jelasnya.

BPOM optimis langkah ini akan membawa dampak positif jangka panjang, tidak hanya bagi BPOM tetapi juga bagi masyarakat luas. Pemindahan ke IKN adalah langkah strategis sebagai peluang besar untuk memperkuat peran BPOM dalam menjaga keamanan obat dan makanan di seluruh Indonesia, sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat, BPOM berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanannya, sejalan dengan transformasi besar yang sedang berlangsung di Ibu Kota Nusantara. ■

Selamat **HARI IBU**



22
Desember
2024

perempuan Berdaya,
INDONESIA MAJU

[FILM DOKUMENTER]
JELAJAH

Ramadan:
Cahaya Kebaikan
di Perbatasan

Dear Jannu

THE LAST
GUARDIAN
OF SAGO



@bpom.official

SUBSCRIBE





Selamat Hari
NATAL
dan
Tahun Baru
2025



1500533
HALOBPOM



pom.go.id



[@bpom_ri](https://www.instagram.com/bpom_ri)



[@bpom_ri](https://twitter.com/bpom_ri)



[@bpom.official](https://www.facebook.com/bpom.official)



[@bpom.official](https://www.youtube.com/bpom.official)